

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI KECAMATAN KOTA DEPOK 2025

Kerjasama:



Sekolah
Sains Data, Matematika,
dan Informatika



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2025

Analisis Ketimpangan Ekonomi

Kota Depok 2025

Ukuran Buku / <i>Book Size</i>	: A4 29.7 cm × 21.0 cm
Jumlah halaman / <i>Total size</i>	: 80 halaman / <i>page</i>
Naskah / <i>Manuscript</i>	: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, IPB University
Gambar kulit dan Seting / <i>Cover design and Setting</i>	: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, IPB University
Diterbitkan oleh / <i>Published by</i>	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2025 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2025 ini menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk yang terjadi di Kota Depok. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan kecemburuan sosial yang lebar dan tajam, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan berbagai masalah. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Program Studi Statistika dan Sains Data, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) yang telah menyusun Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2025, begitu juga kepada semua pihak yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, November 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok,

Drs. Manto, M.Si.
NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Kami dapat mempersembahkan buku berjudul "Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2025". Buku ini hadir sebagai sebuah upaya untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji permasalahan ketimpangan pendapatan yang ada di wilayah Kota Depok.

Pembangunan ekonomi telah menjadi isu sentral dalam upaya mencapai kemajuan suatu wilayah. Ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga tentang bagaimana dampak pembangunan tersebut dirasakan oleh semua lapisan penduduk. Ketidaksetaraan pendapatan di dalam masyarakat mungkin sulit dihindari sepenuhnya, namun harus tetap dalam kontrol agar tidak menimbulkan masalah sosial ekonomi yang serius seperti kecemburuan sosial.

Buku ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Program Studi Statistika dan Sains Data – SSMI, Institut Pertanian Bogor. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Badan Pusat Statistik yang telah menjadi sumber data utama dalam penyusunan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini tidak hanya menjadi bacaan informatif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perencanaan pembangunan di Kota Depok secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, November 2025
Dekan Sekolah Sains Data, Matematika, dan
Informatika, IPB University

Prof. Dr. Ir. Agus Buono, M.Si., M.Kom.
NIP. 196607021993011001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Ketimpangan Ekonomi	4
2.1.1. Pengukuran Ketimpangan Ekonomi	7
2.1.2. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia	12
BAB III KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK	15
3.1. Gambaran Umum Kota Depok	15
3.2. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2025 berdasarkan Indeks Gini	20
3.3. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2025 menurut Bank Dunia	21
3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2014-2025	23
3.5. Nilai Tingkat Ketimpangan Kecamatan Kota Depok Tahun 2025	28
3.5.1. Ketimpangan Kecamatan Sawangan Tahun 2025	28
3.5.2. Ketimpangan Kecamatan Bojongsari Tahun 2025	30
3.5.3. Ketimpangan Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2025	32
3.5.4. Ketimpangan Kecamatan Cipayung Tahun 2025	34
3.5.5. Ketimpangan Kecamatan Sukmajaya Tahun 2025	36
3.5.6. Ketimpangan Kecamatan Cilodong Tahun 2025	39
3.5.7. Ketimpangan Kecamatan Cimanggis Tahun 2025	41
3.5.8. Ketimpangan Kecamatan Tapos Tahun 2025	44
3.5.9. Ketimpangan Kecamatan Beji Tahun 2025	46
3.5.10. Ketimpangan Kecamatan Limo Tahun 2025	48
3.5.11. Ketimpangan Kecamatan Cinere Tahun 2025	50
3.6. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok Tahun 2025	52
3.7. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok tahun 2023-2025	54
3.8. Perbandingan Ketimpangan Tingkat Kecamatan dengan Ketimpangan Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2025	63
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan	16
Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran	17
Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha	18
Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	19
Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2025 di Kota Depok.....	20
Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2025.....	22
Tabel 7 PDRB Kota Depok 2014-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).....	24
Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2014-2025	25
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok 2014-2024	26
Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2023-2025	27
Tabel 11 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Sawangan	28
Tabel 12 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sawangan 2025.....	30
Tabel 13 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Bojongsari.....	30
Tabel 14 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Bojongsari 2025	32
Tabel 15 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Pancoran Mas.....	32
Tabel 16 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Pancoran Mas 2025	34
Tabel 17 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cipayung	34
Tabel 18 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cipayung 2025	36
Tabel 19 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Sukmajaya	37
Tabel 20 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sukmajaya 2025.....	39
Tabel 21 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cilodong.....	39
Tabel 22 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cilodong 2025	41
Tabel 23 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cimanggis	42
Tabel 24 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cimanggis 2025.....	44
Tabel 25 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Tapos	44
Tabel 26 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Tapos 2025	46
Tabel 27 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Beji.....	46
Tabel 28 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Beji 2025	48
Tabel 29 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Limo	48

Tabel 30 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Limo 2025	50
Tabel 31 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cinere	50
Tabel 32 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cinere 2025	52
Tabel 33 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	64
Tabel 34 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	65
Tabel 35 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	67
Tabel 36 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	68
Tabel 37 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	70
Tabel 38 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	71
Tabel 39 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	72
Tabel 40 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	74
Tabel 41 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	75
Tabel 42 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	76
Tabel 43 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Inverted U-curve atau dikenal dengan Kurva Kuznet.....	4
Gambar 2 Kurva Lorenz	8
Gambar 3 Kondisi Ketimpangan Pendapatan berdasarkan Kurva Lorenz.....	10
Gambar 4 Konsep perhitungan Koefisien Gini dan kaitannya dengan Kurva Lorenz.....	10
Gambar 5 Kurva Lorenz Kota Depok 2025	21
Gambar 6 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	23
Gambar 7 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2014-2025.....	25
Gambar 8 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2023- 2025.....	27
Gambar 9 Kurva Lorenz Kecamatan Sawangan 2025.....	29
Gambar 10 Kurva Lorenz Kecamatan Bojongsari 2025	31
Gambar 11 Kurva Lorenz Kecamatan Pancoran Mas 2025	33
Gambar 12 Kurva Lorenz Kecamatan Cipayung 2025	35
Gambar 13 Kurva Lorenz Kecamatan Sukmajaya 2025.....	38
Gambar 14 Kurva Lorenz Kecamatan Cilodong 2025.....	40
Gambar 15 Kurva Lorenz Kecamatan Cimanggis 2025.....	43
Gambar 16 Kurva Lorenz Kecamatan Tapos 2025	45
Gambar 17 Kurva Lorenz Kecamatan Beji 2025	47
Gambar 18 Kurva Lorenz Kecamatan Limo 2025	49
Gambar 19 Kurva Lorenz Kecamatan Cinere 2025.....	51
Gambar 20 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Kota Depok 2025	53
Gambar 21 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok 2025	54
Gambar 22 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Kota Depok Tahun 2023 – 2025	56
Gambar 23 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok Tahun 2023 – 2025	59
Gambar 24 Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terendah Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok 2023 – 2025	61
Gambar 25 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025.....	63
Gambar 26 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025.....	65
Gambar 27 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025.....	66
Gambar 28 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025.....	68
Gambar 29 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025.....	69
Gambar 30 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025.....	70

Gambar 31 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	72
Gambar 32 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	73
Gambar 33 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	74
Gambar 34 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	76
Gambar 35 Nilai <i>Gini Ratio</i> Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perubahan yang terencana guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan disebut pembangunan. Proses perubahan ini mencakup keseluruhan system sosial, seperti ekonomi, politik, pertahanan, infrastruktur teknologi, pendidikan, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan pada sektor ekonomi sebagai salah satu sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan merupakan salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi melibatkan berbagai sektor seperti pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Menurut Siedman (2005), pembangunan ekonomi adalah proses pembuatan dan pemanfaatan sumber daya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk membuat suatu perbaikan serta pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk melihat indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah karena laju pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat luas. Sebagai salah satu contoh, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat pada umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Terciptanya lapangan kerja dalam jumlah memadai sehingga menghasilkan tingkat pengangguran yang rendah juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya merupakan indikator makro utama yang kerap kali digunakan pada berbagai perbincangan tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan ekonomi di suatu pemerintahan berjalan efektif, pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan periode sebelumnya menjadi penting.

Menurut Tambunan (2001), kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang dilakukan akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu rentang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan antar golongan masyarakat dan kesenjangan antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2011-2021 tanpa melibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 memiliki rata rata sebesar 6,71. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (tanpa melibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020) yaitu sebesar 5,49. Secara makro, nilai tersebut dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kuat. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 membuat pemerintah Kota Depok perlu mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan kesejahteraan masyarakat dan apakah ketimpangan antar golongan masyarakat di Kota Depok masih berimbas pada tahun 2025 ini. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan suatu alat untuk mengukur ketimpangan antar golongan masyarakat, diantaranya dengan menggunakan *gini ratio* dan Ukuran Ketimpangan menurut Bank Dunia.

Perhitungan indikator ketimpangan pendapatan misalnya Indeks Gini Rasio umumnya menggunakan data Susenas yang akurasinya didesain minimal sampai tingkat kabupaten/kota. Sementara untuk perhitungan indikator ketimpangan tingkat kecamatan, perhitungan langsung berdasarkan data Susenas dikhawatirkan kurang akurat akibat ukuran sampel yang kurang memadai. Tidak memadainya ukuran sampel dapat diatasi dengan menambah jumlah sampel melalui survei, namun dengan jumlah 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok maka survei terkait pengukuran indikator ketimpangan akan membutuhkan dana dan usaha yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan

pengukuran dengan penggunaan metode pendugaan area kecil (*small area estimation*). *Small Area Estimation* (SAE) adalah suatu teknik statistika untuk menduga parameter-parameter sub populasi yang ukuran sampelnya (contoh) kecil, sedangkan area kecil didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi (sub populasi) yang ukuran contohnya kecil dengan suatu peubah tertentu yang menjadi perhatian (Rao dan Molina, 2015).

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis kondisi ketimpangan ekonomi Kota Depok tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan *gini ratio* dan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, sehingga akan diperoleh :

- a. Nilai indeks *gini ratio* Kota Depok tahun 2025 beserta kategorinya, disandingkan dengan indeks *gini ratio* Kota Depok tahun-tahun sebelumnya;
- b. Nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2025 beserta kategorinya, disandingkan dengan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Nilai indeks *gini ratio* kecamatan Kota Depok tahun 2025 beserta kategorinya;
- d. Ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia kecamatan Kota Depok tahun 2025 beserta kategorinya;
- e. Analisis mengenai hasil yang ada.

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan *gini ratio* Kota Depok tahun 2025 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 khususnya data KOR (data dasar), PDRB Kota Depok 2024, dan prediksi Data Jumlah Penduduk Kota Depok 2025. Sumber data tersebut berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Depok dan BPS Pusat.

BAB II METODOLOGI

2.1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara berkembang. Di dalam bukunya, Todaro dan Smith (2012) menyoroti tentang keberhasilan negara-negara di dunia dalam meningkatkan kondisi ekonominya yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun demikian, kondisi tersebut masih menyisakan permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, yakni kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemampuan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal tidak serta merta akan menghilangkan kemiskinan di negara tersebut. Selain itu, peningkatan kondisi perekonomian sebuah negara belum tentu dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan ketimpangan ekonomi.



Gambar 1 Inverted U-curve atau dikenal dengan Kurva Kuznet

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi dapat dijelaskan secara umum dengan kurva Kuznet atau yang juga umum dikenal dengan *inverted U-curve*. Pada tahun 1950-an, Simon Kuznet mengamati perkembangan dan transformasi ekonomi negara-negara di dunia, mulai dari negara yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian primer di daerah pedesaan, hingga menjadi sebuah negara yang perekonomiannya ditopang oleh

industri di perkotaan. Atas dasar dinamika tersebut, Simon Kuznet merumuskan sebuah hipotesa yang sangat terkenal, dimana seiring dengan perkembangan perekonomian sebuah negara, maka kekuatan pasar akan mendorong terciptanya peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat dan selanjutnya ketimpangan pendapatan tersebut akan menurun ketika tingkat pendapatan tertentu telah dicapai.

Para ekonom sepakat bahwa ketimpangan pendapatan umum ditemukan di setiap negara, namun yang perlu menjadi perhatian utama bagi pemangku kebijakan adalah adanya *extreme income inequality*. Todaro dan Smith (2012) menyatakan bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) alasan mengapa *extreme income inequality* merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh setiap negara. Alasan pertama adalah adanya indikasi ekonomi yang tidak efisien ketika terdapat kondisi *extreme income inequality* pada sebuah negara. Ekonomi yang tidak efisien muncul ketika adanya ketimpangan pendapatan yang semakin besar akan mengakibatkan persentase penduduk yang terkategori *bankable* akan semakin kecil. Akibatnya, sebagian besar penduduk di negara tersebut tidak akan memiliki akses kredit ke perbankan, yang selanjutnya akan mengurangi kemampuan masyarakat di negara tersebut untuk meningkatkan pendidikannya atau memperluas usahanya.

Alasan kedua yang menjadikan permasalahan *extreme income inequality* merupakan hal yang sangat penting adalah terkait dengan stabilitas sosial dan solidaritas. Kelompok orang yang kaya akan menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi yang akan menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri. Kondisi tersebut akan mendorong munculnya *rent seeking behavior, excessive lobbying*, sampai dengan permasalahan korupsi. Pada akhirnya yang akan sangat dirugikan adalah kelompok masyarakat miskin, dimana sulit sekali bagi mereka untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya.

Extreme income inequality mencerminkan adanya ketidakadilan. Seorang philosopher John Rawls mengilustrasikan konsep ketidakadilan tersebut dengan menggunakan sebuah *thought experiment*. Setiap manusia tidak dapat memilih

untuk dilahirkan di keluarga tertentu. Ketika ketimpangan pendapatan sangat besar, maka terdapat peluang, seorang manusia dilahirkan di keluarga yang kaya raya, dan dapat juga seorang manusia dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. Ketidakpastian tersebut disebutkan Rawls sebagai kondisi “*veil of ignorance*”. Sebuah survey yang dia lakukan menunjukkan bahwa preferensi dari sebagian besar orang adalah adanya ketimpangan pendapatan yang kecil, sehingga kondisi ketidakpastian yang dijelaskan sebelumnya tidak terjadi.

Ketimpangan ekonomi tidak selalu terkait dengan perbedaan pendapatan antara rumah tangga, namun juga ketimpangan pendapatan antar wilayah. Wilayah yang dimaksud dapat berarti di setiap level, baik itu antar negara, antar provinsi, antar kabupaten, hingga unit terkecil, seperti misalnya antar desa (kelurahan). Ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat disebabkan oleh banyak aspek, diantaranya adalah adanya perbedaan sumberdaya alam yang dimiliki, kondisi geografis, dan juga kondisi demografi. Terdapat wilayah yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti minyak bumi, batubara, dan lain-lain, yang membuat wilayah tersebut menjadi relatif lebih kaya dibandingkan daerah lainnya yang miskin akan sumber daya alam. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada pembangunan di wilayah yang bersangkutan, dan muncul perbedaan atau *gap* yang besar antara daerah yang maju dengan daerah yang terbelakang (Kuncoro, 2006).

Hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi sebuah negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di negara tersebut, dapat dijelaskan dengan konsep *inverted U-curve*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada konsep kurva Kuznet. North (1955) merumuskan hipotesa neo klasik, dimana dikatakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah akan memiliki kecenderungan yang terus meningkat pada awal tahapan pembangunan sebuah negara. Namun demikian, setelah mencapai titik puncaknya, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut lambat laun akan mengecil seiring dengan peningkatan perekonomian di negara tersebut.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah, atau dapat juga disebut dengan *spatial economic inequality* juga menjadi fokus dari Gunnar Myrdal yang

mengeluarkan teori Myrdal pada tahun 1957. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Myrdal (1957), pertumbuhan ekonomi regional (antar wilayah) akan sangat tergantung pada kekuatan dari *spread effect* dan *backwash effect*. *Spread effect* adalah dampak positif yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah ke wilayah sekitarnya. Dampak positif yang dimaksud dapat berupa aliran investasi ke wilayah sekitarnya, transfer teknologi, dan lain-lain. Sementara itu, terdapat juga *backwash effect* yang merepresentasikan dampak negatif pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ke wilayah sekitarnya. Dampak negatif yang dimaksud dapat berupa aliran migrasi tenaga kerja ke wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang mana akan mengurangi input pada wilayah sekitarnya guna mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah yang sedang tumbuh.

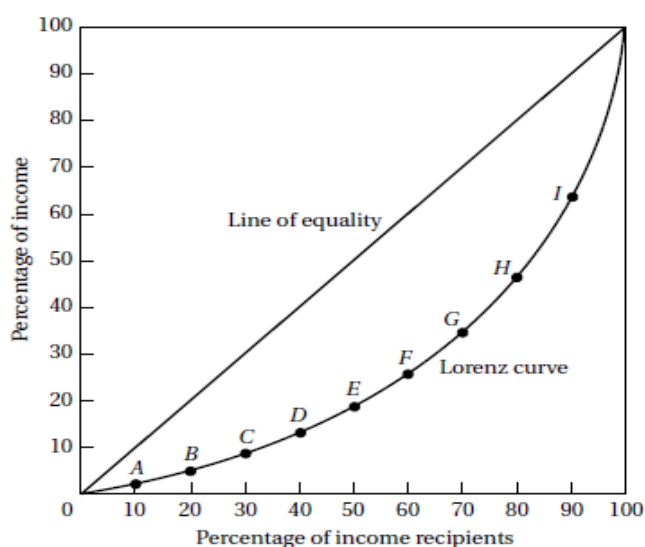
Myrdal (1957) menekankan bahwa ketika *backwash effect* menjadi sangat dominan, maka pertumbuhan ekonomi pada wilayah kaya akan semakin cepat dan membuat superioritas wilayah tersebut semakin kuat. Sementara itu, wilayah sekitarnya akan semakin tertinggal dikarenakan semua sumberdaya yang dimilikinya telah diserap oleh wilayah yang maju. Myrdal (1957) juga menekankan bahwa adanya perdagangan bebas antara wilayah akan sangat menguntungkan bagi wilayah yang maju, yang memiliki keunggulan kompetitif, baik itu terkait dengan sumber daya alam, maupun pangsa pasar yang besar (sebagai akibat adanya migrasi). Pada kondisi tersebut, maka intervensi pemerintah menjadi hal yang krusial, untuk menjamin keseimbangan antara wilayah yang maju dengan wilayah sekitarnya.

2.1.1. Pengukuran Ketimpangan Ekonomi

Merujuk pada Todaro dan Smith (2012), ukuran ketimpangan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni *size distribution of income* dan *functional distribution of income*. *Size distribution of income* merupakan suatu ukuran yang hanya terpusat kepada besaran *income* yang diterima oleh masyarakat, tanpa menghiraukan bagaimana cara masyarakat mendapatkan

income tersebut. Dengan demikian, selama besaran yang diterima oleh dua atau lebih rumah tangga adalah sama, meskipun rumah tangga yang satu mendapatkan *income*-nya dari keuntungan sewa modal, sedangkan yang lainnya mendapatkan *income* dari upah bekerja, maka kelompok rumah tangga tersebut dikategorikan dalam kelompok yang sama. Secara umum, kelompok rumah tangga dibagi kedalam kuartil, desil, atau persentil.

Sebagai contoh dapat digunakan ilustrasi dengan menggunakan asumsi sebuah negara dengan 20 rumah tangga. Masing-masing rumah tangga memiliki pendapatan dengan besaran yang berbeda, lalu peneliti dapat mengurutkan kedua puluh rumah tangga tersebut mulai dari *income* paling rendah sampai dengan *income* paling tinggi. Lalu selanjutnya, dapat dibagi berdasarkan desil (dibagi menjadi 10 kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri atas 2 rumah tangga). Salah satu ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan adalah ratio pendapatan yang diterima oleh 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi dengan 40 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah. Rasio tersebut juga dikenal dengan rasio Kuznet yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan antara kelompok rumah tangga dengan pendapatan tertinggi dengan kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah.



Sumber: Todaro dan Smith (2012)

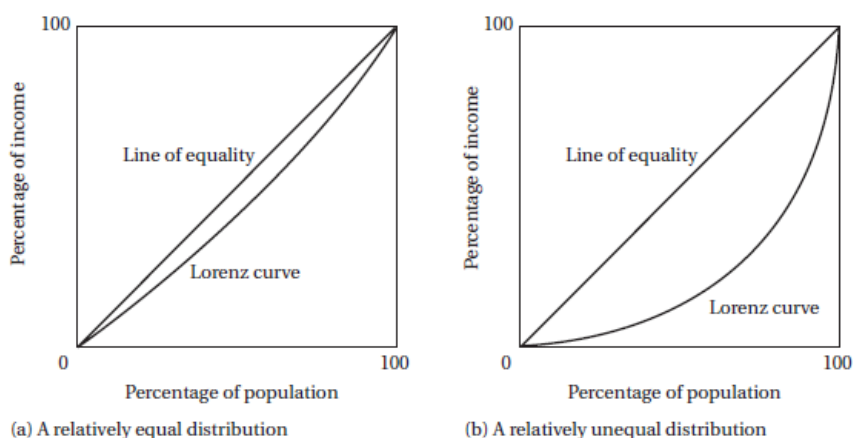
Gambar 2 Kurva Lorenz

Ukuran ketimpangan ekonomi lain yang juga umum digunakan adalah kurva Lorenz. Secara teknis, kurva Lorenz menunjukkan hubungan antara besar persentase pendapatan terhadap persentase rumah tangga yang menerimanya. Persentase rumah tangga yang menerima pendapatan ditempatkan pada sumbu horizontal (secara kumulatif) dan persentase pendapatan diletakkan pada sumbu vertikal. Secara visual, bentuk dari kurva Lorenz ditunjukkan pada Gambar 2. Jika kita kaitkan dengan rasio Kuznet yang dipaparkan sebelumnya, maka 40 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah ditunjukkan oleh titik D, sedangkan 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi ditunjukkan oleh titik H. Jika kita gunakan satu titik, yakni titik C, maka dapat ditunjukkan bahwa 30 persen dari populasi di wilayah tersebut hanya menerima 10 persen dari total pendapatan wilayah secara keseluruhan.

Jika kita perhatikan secara lebih seksama, maka terdapat garis 45 derajat yang disebut juga dengan *line of equality*. Titik-titik yang berada pada garis 45 derajat tersebut menunjukkan bahwa persentase *income* yang diterima akan sama dengan persentase jumlah rumah tangga yang menerimanya. Atau dengan kata lain, merepresentasikan kondisi *perfect equality* pada wilayah yang dianalisa. Sementara itu, kurva Lorenz menunjukkan kondisi aktual yang terjadi. *Gap* atau senjang antara *line of equality* dan kurva Lorenz secara langsung menunjukkan ketimpangan pendapatan yang terjadi pada wilayah yang dianalisa. Semakin jauh *gap* antara kurva Lorenz dengan garis 45 derajat menunjukkan semakin timpangnya pendapatan pada wilayah yang dianalisa. Sebaliknya, jika *gap* antara kurva Lorenz dengan garis 45 derajat semakin kecil maka menunjukkan semakin baiknya kondisi ketimpakan pendapatan di wilayah yang dianalisa.

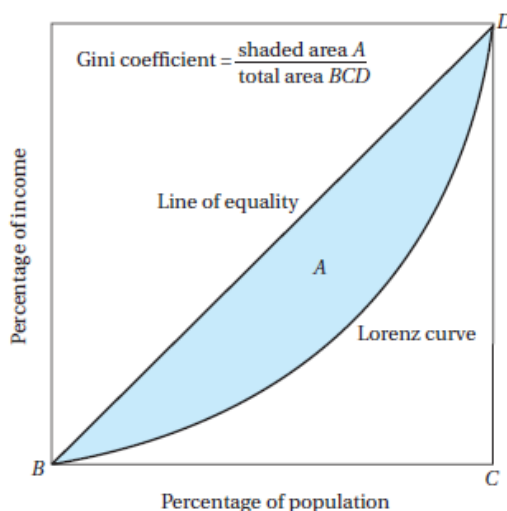
Untuk mengkuantifikasi ukuran ketimpangan yang disajikan pada kurva Lorenz, dikembangkan sebuah ukuran yang paling umum dipakai dalam analisa ketimpangan ekonomi, yakni koefisien Gini. Secara teknis, koefisien gini diukur dengan membandingkan luasan area gap yang terbentuk (wilayah A) dengan total area segitiga (BCD). Jika kita bandingkan Gambar 2 dengan Gambar 3 maka dapat dengan mudah kita turunkan hubungan antara kurva Lorenz dengan koefisien gini.

Ketika ketimpangan pendapatan rendah, maka akan direpresentasikan dengan bentuk kurva Lorenz seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3(a). Jika dihitung dengan menggunakan formula dan konsep yang ditunjukkan pada Gambar 4, maka akan didapatkan nilai koefisien gini yang kecil (mendekati nol). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien gini yang kecil menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan atau ekonomi yang rendah, dan sebaliknya nilai koefisien gini yang besar (mendekati 1) menunjukkan kondisi tingkat ketimpangan pendapatan atau ekonomi yang parah.



Sumber: Todaro dan Smith (2012)

Gambar 3 Kondisi Ketimpangan Pendapatan berdasarkan Kurva Lorenz



Sumber: Todaro dan Smith (2012)

Gambar 4 Konsep perhitungan Koefisien Gini dan kaitannya dengan Kurva Lorenz

Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan atau ekonomi yang telah memenuhi 4 (empat) karakter indikator yang ideal, yakni *anonymity*, *scale independence*, *population independence*, dan *transfer principle*. Karakter *anonymity* menunjukkan bahwa ukuran koefisien gini tidak tergantung kepada siapa yang menerima pendapatan yang paling tinggi. *Scale independence* dari koefisien gini menunjukkan bahwa ukuran yang dihasilkan tidak akan tergantung kepada ukuran atau besar kecilnya ekonomi yang dianalisa, atau bagaimana cara peneliti mengukur *income*. Karakter *population independence* menunjukkan bahwa ukuran yang dihasilkan tidak akan tergantung pada jumlah populasi yang dianalisa. Karakter yang terakhir, yakni *transfer principle*, menunjukkan bahwa koefisien gini telah memenuhi kaidah transfer, dimana jika dilakukan redistribusi pendapatan, dimana sebagian pendapatan yang diterima orang kaya dialihkan kepada rumah tangga yang miskin, maka ukuran koefisien gini yang baru akan menunjukkan hasil dimana ketimpangan ekonomi yang terjadi akan lebih baik (kecil) dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya redistribusi pendapatan.

Konsep pengukuran ketimpangan ekonomi yang kedua adalah *functional distribution of income*. Berbeda dengan sebelumnya, konsep pengukuran yang didasarkan pada *functional distribution of income*, memfokuskan pada bagaimana rumah tangga mendapatkan *income*-nya, apakah didapatkan dari upah, pendapatan sewa, pendapatan bunga, atau profit. Dalam perkembangannya pendekatan pengukuran tersebut tidak banyak digunakan dikarenakan kelemahannya dalam memasukkan pengaruh dari *non-market forces* (serikat buruh) terhadap *factor price* (upah) yang digunakan.

Adapun rumus umum koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n [fp_i(Fc_i + Fc_{i-1})]$$

dimana

GR : Koefisien Gini

fp_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

Nilai koefisien *Gini Ratio* berkisar antara 0 dan 1, adapun kategorinya adalah sebagai berikut:

$GR < 0,3$: ketimpangan rendah

$0,3 \leq GR \leq 0,5$: ketimpangan sedang

$GR > 0,5$: ketimpangan tinggi

2.1.2. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Indikator yang mencerminkan ketimpangan ekonomi atau pendapatan dari suatu negara yang dipublikasikan oleh Bank Dunia digabungkan dengan indikator kemiskinan, yang termasuk kedalam kelompok data "*Poverty and Equity*". Di dalam kelompok tersebut terdapat 64 indikator yang terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia. Keseluruhan indikator yang dimaksud dapat berupa indikator yang sama namun dihitung pada level negara, pedesaan dan perkotaan. Dengan demikian, satu indikator tertentu (misal jumlah orang miskin) dapat disajikan menjadi beberapa indikator, berdasarkan lokasi (negara, desa, kota), berdasarkan definisi miskin yang digunakan (\$1.9 per hari, \$3.2 per hari, \$5.5 per hari), dan sebagainya.

Terkait dengan ketimpangan ekonomi, data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia pada kelompok data "*Poverty and Equity*" dapat dilihat pada beberapa indikator. Indikator yang dimaksud diantaranya adalah *Gini index*, *income share held by fourth 20%*, *income share held by highest 10%*, *income share held by highest 20%*, *income share held by lowest 10%*, *income share held by lowest 20%*, *income share held by second 20%*, dan *income share held by third 20%*.

Bank Dunia juga memiliki sebuah *data sharing platform* khusus yang menganalisa tentang *income inequality* di kawasan Amerika Latin dan Karibia yakni LAC Equity Lab. Platform tersebut menyajikan data yang sangat komprehensif

untuk memahami kemiskinan dan ketimpangan ekonomi pada kawasan Amerika Latin dan Karibia. Terdapat 4 (empat) indikator yang umum disajikan, yakni terkait dengan *income distribution*, *inequality trends*, *composition by quintile* dan *urban/rural inequality*.

Secara lebih spesifik, LAC Equity Lab menyajikan perkembangan data untuk 4 (empat) indikator ketimpangan ekonomi atau pendapatan. Indikator yang pertama adalah koefisien Gini yang diturunkan dari kurva Lorenz dengan konsep dan mekanisme teknis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Indikator kedua yang disajikan adalah *decile dispersion ratio*, yang merupakan indikator sederhana dari ketimpangan, yang merepresentasikan rasio dari pendapatan (atau pengeluaran) rata-rata dari 10 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi (persentil 90) dengan 10 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah (persentil 10). Indikator ini sangat sederhana dan cukup informatif, namun menghiraukan distribusi *income* dari rumah tangga yang dianalisa.

Indikator ketiga yang disajikan adalah *Generalized Entropy (GE) measure*. *Generalized entropy measure* yang dapat digunakan adalah *Theil Index* dan *mean log deviation*. Nilai dari GE bervariasi antara 0 sampai dengan tak hingga, dimana nilai GE sama dengan nol menunjukkan distribusi pendapatan yang merata, sedangkan nilai GE yang besar merepresentasikan kondisi ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam *dashboard* yang disediakan Bank Dunia, terdapat variasi ukuran GE yang dipublikasikan, seperti GE (0), GE (1), dan GE (2).

Indikator keempat yang dipublikasikan pada LAC Equity Lab adalah Atkinson's Inequality Measures. Indikator ini merupakan ukuran ketimpangan yang dikembangkan oleh Atkinson (1970) dimana memiliki parameter bobot e yang mengukur seberapa jauh dari *inequality*. Seiring dengan peningkatan bobot e maka indikator yang dihasilkan akan semakin sensitif dengan transfer pada sisi kanan dari distribusi dan tidak sensitif terhadap transfer pada titik puncak.

Secara praktis identifikasi ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia adalah dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok

sesuai dengan besarnya pendapatan. Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

dimana

YD_4 : Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan ke $i - 1$

P_i : Persentase kumulatif penduduk ke i

q_i : Persentase pendapatan ke i

Kategori ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah;

Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

BAB III KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK

3.1. Gambaran Umum Kota Depok

Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur (<https://depok.go.id/geografi>). Kota ini berbatasan dengan Jakarta di sebelah utara dan berbatasan dengan Kabupaten Bogor di sebelah selatan, timur, dan barat. Depok merupakan salah satu bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lokasi strategis letak wilayah Kota Depok ini menyebabkan kota ini semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang terhubung secara regional dengan kota-kota lainnya. Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif apabila dilihat dari letaknya yang sangat strategis baik dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km² terdiri dari 11 kecamatan dengan 63 kelurahan. Adapun kecamatannya adalah Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo dan Cinere. Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2010 berdasarkan angka sensus 2010 adalah 1.738.570, jumlah penduduk sementara tahun 2020 berdasarkan sensus 2020 adalah 2.056.335. Jumlah penduduk tahun 2024 mengacu pada Kota Depok dalam Angka 2025 sebanyak 2.165.635 jiwa, sementara berdasarkan proyeksi jumlah penduduk untuk 2025 yaitu 2.168.000. Sementara proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yaitu tahun 2025 untuk laki-laki sebanyak 1.089.860 jiwa dan perempuan sebanyak 1.078.140 jiwa (Tabel 1). Jumlah penduduk laki laki lebih banyak

dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2025 sebesar 101,09. Sementara proyeksi Angka Beban Tanggungan (ABT) di kota Depok untuk tahun 2025 adalah 41.16%, dengan kata lain rasio ketergantungan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh anggota populasi yang bekerja dalam mendukung anggota non-produktif di kota Depok sebesar 41.16%.

Tabel 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Ribuan Jiwa) Tahun 2025

Kelompok Umur (Tahun)	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	83,74	80,41	164,15
5 - 9	86,03	81,68	167,71
10 - 14	82,94	80,13	163,07
15 - 19	89,50	83,82	173,32
20 - 24	82,17	78,24	160,41
25 - 29	79,35	76,79	156,14
30 - 34	82,63	84,29	166,92
35 - 39	86,90	89,20	176,10
40 - 44	86,06	85,99	172,05
45 - 49	85,41	83,07	168,48
50 - 54	74,41	72,63	147,04
55 - 59	61,26	60,95	122,21
60 - 64	45,66	47,47	93,13
65 - 69	30,67	33,47	64,14
70 - 74	19,38	22,09	41,47
75+	13,75	17,91	31,66
Total	1.089,86	1.078,14	2.168,00

Keterangan: hasil perhitungan

Proyeksi pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Depok untuk tahun 2025 disajikan pada Tabel 2. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok 10 persen terbawah adalah sejumlah Rp. 840.416 per kapita per bulan dengan simpangan baku 146.331. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 500.387 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 1.051.949 per orang setiap bulannya. Besaran pengeluaran meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Rata-rata pengeluaran pada

kelompok 10 persen teratas adalah sebesar Rp. 9.105.835 per kapita per bulan dengan simpangan baku Rp. 2.607.062, melonjak hampir 1.63 kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran di bawahnya yang sebesar Rp. 5.582.508 per orang per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 6.689.072 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 29.936.505 per orang setiap bulannya.

Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran
Kota Depok Tahun 2025

No	Kelompok Pengeluaran (Rp)	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			
		Rata-rata (Rp)	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)	Simpangan Baku (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<=1.051.948,5	860.416	500.387	1.051.949	146.331
2	1.052.688 – 1.356.612,1	1.188.776	1.052.688	1.356.612	85.978
3	1.357.972,7 – 1.652.245,5	1.487.910	1.357.973	1.652.245	92.510
4	1.654.422,3 – 1.897.107,6	1.767.654	1.654.422	1.897.108	73.514
5	1.898.013,2 – 2.153.632,1	2.020.238	1.898.013	2.153.632	77.702
6	2.154.890,9 – 2.752.197,1	2.469.551	2.154.891	2.752.197	183.313
7	2.753.401,6 – 3.602.167,5	3.238.993	2.753.402	3.602.167	245.300
8	3.603.047,4 – 4.733.648,3	4.152.069	3.603.047	4.733.648	334.989
9	4.743.811,7 – 6.674.265,1	5.582.508	4.743.812	6.674.265	591.089
10	>=6.674.265,1	9.105.835	6.689.072	29.936.505	2.607.062

Keterangan: hasil perhitungan

Ketimpangan ekonomi dapat muncul ketika akses ke berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi tidak merata. Beberapa sektor mungkin menawarkan gaji dan kesempatan kerja yang lebih tinggi daripada sektor lainnya. Jika sebagian besar kesempatan berada di sektor yang lebih makmur dan hanya sedikit tersedia di sektor lainnya, maka ketimpangan pendapatan antara pekerja di sektor tersebut dapat meningkat. Tabel 3 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk menurut lapangan usaha dan kelompok pengeluaran pada tahun 2025. Sebagian besar penduduk pada setiap kelompok pengeluaran menjadikan sektor transportasi, perdagangan, informasi dan komunikasi sebagai lapangan usahanya

kecuali pada kelompok pengeluaran ke-1, ke-4, dan ke-5. Pada kelompok 10 persen pengeluaran terbawah dan kelompok 10 persen pengeluaran teratas dengan masing-masing persentasenya adalah 19,12 persen dan 30,35 persen. sektor perdagangan, hotel, dan rumah makan merupakan lapangan usaha tertinggi kedua dari kedua kelompok pengeluaran dengan masing-masing persentasenya adalah 22,05 persen untuk kelompok 10 persen pengeluaran terendah dan 18,69 persen untuk kelompok 10 persen pengeluaran teratas. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa sektor jasa dan lainnya menjadi lapangan usaha paling rendah di antara semua sektor lapangan usaha yang ada.

Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha
dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2025

Lapangan Usaha	Kelompok Pengeluaran (Rp)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Pertanian	0,00	3,75	0,00	2,32	7,31	0,60	4,33	5,54	2,54	10,03
Pertambangan dan penggalian	8,38	15,64	16,53	9,54	12,71	14,96	14,49	12,22	14,02	4,44
Industri Pengolahan	23,26	12,32	21,35	11,59	17,82	19,72	11,74	15,21	16,76	18,69
Listrik, Air dan Gas	15,77	17,61	7,11	15,89	6,64	6,35	6,37	10,36	5,77	7,75
Konstruksi/bangunan	0,47	0,00	1,10	2,30	1,73	1,35	2,82	1,26	1,26	1,37
Perdagangan, hotel, dan rumah makan	22,05	21,91	23,86	24,59	25,73	20,67	22,04	18,69	20,83	18,69
Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi	19,12	23,49	25,36	21,94	17,89	28,10	35,63	20,59	31,15	30,35
Keuangan dan asuransi	10,95	5,28	4,70	11,83	10,17	8,25	2,58	16,13	5,47	7,98
Jasa dan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,71
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: hasil perhitungan

Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor peubah saja, namun pendidikan merupakan salah satu peubah yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah ketimpangan. Individu yang mendapatkan pendidikan yang baik atau memadai cenderung akan memiliki kesempatan

pekerjaan yang layak atau kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini tentunya akan mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan mereka. Tabel 4 menyajikan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran dan tingkat pendidikan. Setiap kelompok pengeluaran, mayoritas tingkat pendidikan penduduk adalah SLTA/ sederajat kecuali pada kelompok pengeluaran teratas. Untuk kelompok pengeluaran 10 persen terendah, mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan tertinggi adalah SLTA/ sederajat diikuti tingkat pendidikan SMP/ sederajat dan SD/ sederajat. Hanya sekitar 1,66 persen penduduk pada kelompok pengeluaran ini yang berpendidikan universitas pada tahun 2025. Untuk kelompok pengeluaran 10 persen teratas, sebagian besar penduduk merupakan lulusan Universitas dan SLTA/ sederajat. Pada kelompok ini, 22,91 persen penduduk tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat dan 69,10 persen Universitas. Namun ada sekitar 2,74 persen tingkat pendidikan SD/ sederajat pada kelompok pengeluaran ini, dan 5,25 persen untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat.

Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	<SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SLTA/ sederajat	Universitas	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.051.948,5	0,02	31,25	21,14	45,93	1,66	100
1.051.948,5 - 1.356.612,1	3,86	24,99	15,95	49,25	5,95	100
1.356.612,1 - 1.652.245,5	0	24,61	12,77	58,86	3,76	100
1.652.245,5 - 1.897.107,6	1,51	15,21	21,54	47,99	13,75	100
1.897.107,6 - 2.153.632,1	0,04	13,82	15,72	52,92	17,49	100
2.153.632,1 - 2.752.197,1	0,03	13,3	14,61	52,9	19,16	100
2.752.197,1 - 3.602.167,5	0	8,16	17,29	49,1	25,45	100
3.602.167,5 - 4.733.648,3	0	8,77	9,72	49,35	32,16	100
4.733.648,3 - 6.674.265,1	2,43	8,8	7,17	43,22	38,37	100
>=6.674.265,1	0	2,74	5,25	22,91	69,1	100

Keterangan: hasil perhitungan

3.2. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2025 berdasarkan Indeks Gini

Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tentang rata-rata pengeluaran individu dalam suatu entitas dalam periode tertentu. Ukuran ini sering digunakan untuk menganalisis tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kota Depok tahun 2025, ada sekitar 220.522 jiwa dari jumlah penduduk Kota Depok yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah berada di Rp. 860.416. Sedangkan ada 216.380 jiwa yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi berada di Rp. 9.105.835 (Tabel 5).

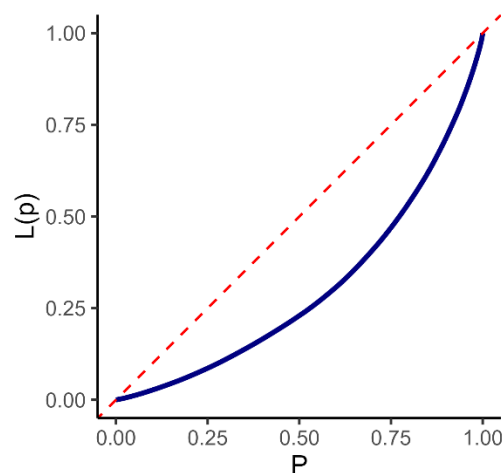
Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2025 di Kota Depok

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$fp * [Fc + Fc - 1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
$\leq 1.051.948,5$	860.416	220.522	0,10172	189.740.641.363	0,0275	
1.052.688 – 1.356.612,1	1.188.776	217.242	0,10021	258.252.126.078	0,0374	0,0093
1.357.972,7 – 1.652.245,5	1.487.910	213.609	0,09853	317.830.995.652	0,046	0,0174
1.654.422,3 – 1.897.107,6	1.767.654	218.651	0,10086	386.499.370.458	0,056	0,028
1.898.013,2 – 2.153.632,1	2.020.238	214.090	0,09875	432.512.758.559	0,0626	0,0391
2.154.890,9 – 2.752.197,1	2.469.551	217.123	0,10015	536.196.350.266	0,0777	0,0538
2.753.401,6 – 3.602.167,5	3.238.993	216.949	0,10007	702.696.246.363	0,1018	0,0717
3.603.047,4 – 4.733.648,3	4.152.069	216.492	0,09986	898.889.618.541	0,1302	0,0947
4.743.811,7 – 6.674.265,1	5.582.508	216.905	0,10005	1.210.873.831.312	0,1754	0,1254
$\geq 6.674.265,1$	9.105.835	216.380	0,09981	1.970.320.609.923	0,2854	0,1711
Jumlah		2.167.963	1,00000	6.903.812.548.514	1,0000	0,6105
Gini Ratio 2025	0,390					

Keterangan: hasil perhitungan

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi atau masyarakat. Indeks Gini mengambil nilai antara 0 hingga 1, di mana 0 mengindikasikan kesetaraan sempurna (semua orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama), dan 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan, sementara yang lainnya tidak

memiliki sama sekali). Indeks Gini ketimpangan pendapatan di Kota Depok pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,390 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kota Depok untuk tahun 2025 yang menunjukkan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 5). Dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2020 (0,344), 2021 (0,367) dan 2022 (0,394) menurut jabar.bps.go.id, maka Indeks Gini Kota Depok hampir mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik pusat dan provinsi, Maret 2025 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Indeks Gini adalah sebesar 0,375 dan 0,416 untuk Provinsi Jawa Barat, sehingga kondisi ketimpangan di Kota Depok lebih rendah dibandingkan Jawa Barat.



Gambar 5 Kurva Lorenz Kota Depok 2025

3.3. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2025 menurut Bank Dunia

Bank Dunia menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kesenjangan dan ketimpangan di antara negara-negara dan dalam suatu negara. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Namun karena data pendapatan sulit untuk didapat, perhitungan indikator ini dapat menggunakan pengeluaran per kapita. Kriteria kesenjangan yang diukur yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang dilakukan oleh 40% penduduk

berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran di suatu wilayah. Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40% kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20% kelompok berpendapatan tinggi.

Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok
Tahun 2025

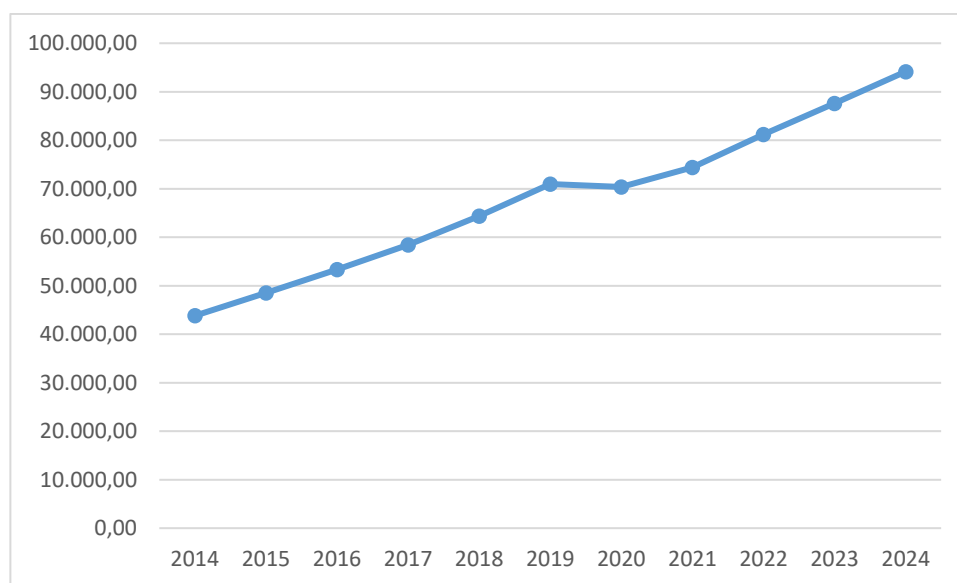
Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	870.024	1.326.189	1.153.816.377.702	19,6
40% menengah	864.654	2.602.338	2.250.122.192.254	38,3
20% teratas	433.285	5.716.442	2.476.848.485.917	42,1
	2.167.963	9.644.969	5.880.787.055.873	100

Keterangan: hasil perhitungan

Tahun 2025, ketimpangan di Kota Depok jika dilihat berdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 19,6% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 870.024 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 1.326.189. Kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 38,3 % dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 864.654 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp.2.602.338. Sementara kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 42,1% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 433.285 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 5.716.442 (Tabel 6). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kota Depok berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2024 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini dapat dilihat dari proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk nilainya lebih besar dari 17%.

3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2014-2025

Badan Pusat Statistik Kota Depok mencatat bahwa pada tahun 2023 populasi penduduk Kota Depok sebanyak 2.145.400 jiwa (Depok dalam Angka 2023). Sementara hasil proyeksi tahun 2024 yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk kota Depok sebanyak 2.163.635 jiwa (Kota Depok dalam Angka 2024) dengan kepadatan penduduk mencapai 10.732 penduduk per km², nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.823 penduduk per km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi antara 7.766 jiwa/km², (Kecamatan Sawangan) dan 16.578 jiwa/km² (Kecamatan Cipayung).



Catatan : PDRB 2022 sd 2024 hasil proyeksi

Gambar 6 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

PDRB Kota Depok tahun 2014-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) disajikan pada Tabel 7. Pada rentang waktu tersebut, PDRB Kota Depok selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. PDRB Kota Depok mencapai nilai minimum pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 38.627,196 dan mencapai nilai maksimum berdasarkan hasil proyeksi tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 94.149,540 (Gambar 6). PDRB Kota Depok Atas

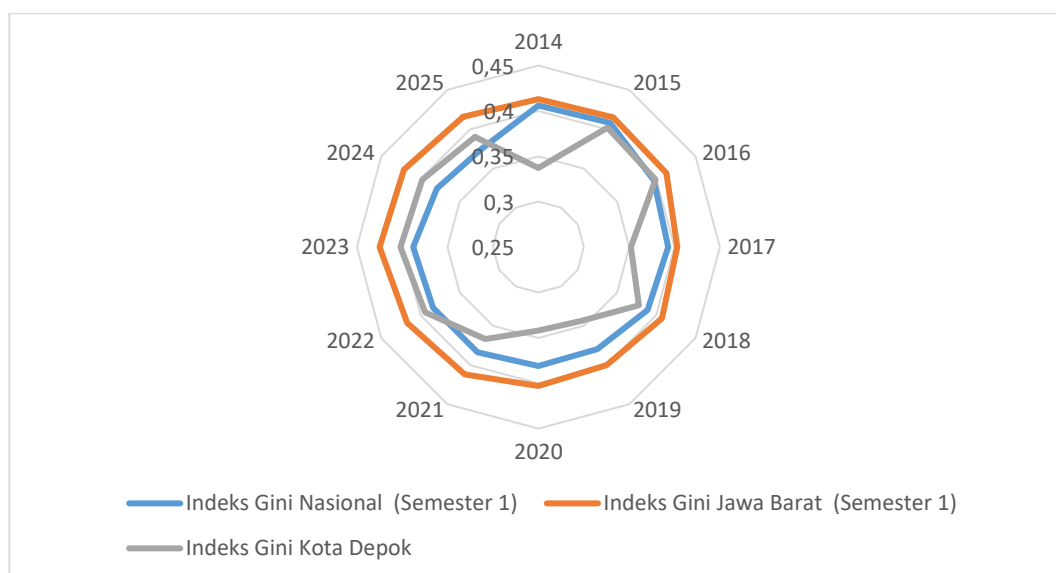
Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada periode 2014-2024 secara rata-rata sebesar Rp. 67.914,490.

Tabel 7 PDRB Kota Depok 2014-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
[1]	[2]
2014	43.806,035
2015	48.532,645
2016	53.331,051
2017	58.408,777
2018	64.363,244
2019	70.964,040
2020	70.386,330
2021	74.382,340
2022	81.166,750
2023*	87.568,620
2024*	94.149,54

Catatan : *hasil proyeksi

Indeks Gini secara Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok pada periode 2014-2024 disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 7. Terlihat bahwa pada periode tersebut, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun provinsi Jawa Barat, kecuali pada tahun 2016 dan 2024 yang sedikit di atas Nasional. Pada periode 2013-2024, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0,375, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0,389) dan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat (0,412). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2014-2025 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sejak tahun 2020 hingga 2023, Indeks Gini di Kota Depok mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya penurunan pemerataan pendapatan di Kota Depok, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan tersebut.



Catatan : BPS dan *hasil proyeksi

Gambar 7 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2014-2025

Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2014-2025

Tahun	Indeks Gini Nasional (Semester 1)	Indeks Gini Jawa Barat (Semester 1)	Indeks Gini Kota Depok
2014	0,406	0,413	0,337
2015	0,408	0,415	0,402
2016	0,397	0,413	0,399
2017	0,393	0,403	0,352
2018	0,389	0,407	0,378
2019	0,38	0,40	0,344
2020	0,381	0,403	0,342
2021	0,384	0,412	0,367
2022	0,384	0,417	0,394
2023*	0,388	0,425	0,402
2024*	0,379	0,421	0,398
2025*	0,375	0,416	0,390

Sumber : BPS, diolah, *hasil proyeksi

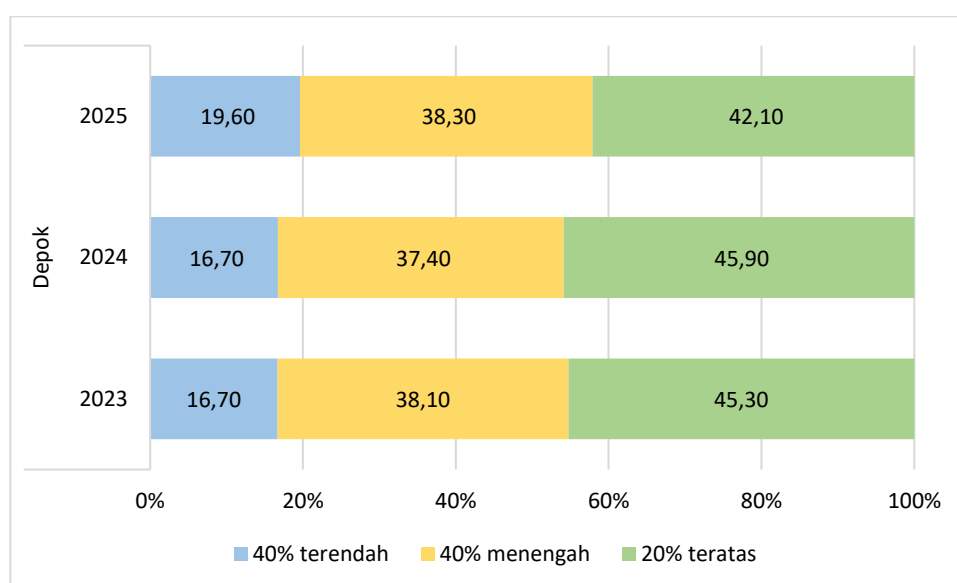
Pembangunan ekonomi memiliki dampak positif, tetapi juga dapat menyebabkan dampak sampingan yang tidak diinginkan. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan adalah dua hal yang berlawanan tetapi sering menjadi fokus kajian bagi peneliti di bidang sosial dan ekonomi. Dalam rentang tahun 2014-2024 (Tabel 9), pertumbuhan ekonomi Kota Depok cukup tinggi (selalu di atas 6%

selama periode 2013 sampai 2019). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun pada tahun 2020, berdasarkan Buku Kota Depok dalam angka 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Depok terjadi pada titik terendah yaitu -1,92. Hal ini terjadi karena efek pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhannya negatif. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Depok mulai naik kembali di angka 3,76 hingga tahun 2024 sebesar 5,04. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama periode 2013-2024 yang tinggi masih disertai dengan adanya ketimpangan, hal ini juga terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas atau belum merata pada semua lapisan masyarakat.

Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok 2014-2024

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	<i>Gini Ratio</i>
[1]	[2]	[3]
2014	7,28	0,337
2015	6,63	0,402
2016	7,28	0,399
2017	6,75	0,352
2018	6,97	0,378
2019	6,74	0,344
2020	-1,92	0,342
2021	3,76	0,367
2022	5,24	0,394
2023	5,05	0,402
2024	5,04	0,398

Sumber : BPS Kota Depok, olah



Gambar 8 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2023-2025

Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2023-2025

Kelompok Pengeluaran	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
[1]	[2]	[3]	[4]
Rata-rata pengeluaran 2023	1.195.341	2.733.718	6.540.823
Rata-rata pengeluaran 2024	1.183.247	2.665.905	6.551.667
Rata-rata pengeluaran 2025	1.326.189	2.602.338	5.716.442

Perbandingan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok untuk tiga tahun terakhir (2023 – 2025) yang disajikan pada Gambar 8. Berdasarkan perbandingan ini, tingkat ketimpangan di Kota Depok tahun 2023 dan 2024 masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang, sedangkan tahun 2024 masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kelompok pengeluaran 40% terendah pada tahun 2025, persentase pengeluarannya tertinggi (19,6%) dibandingkan tahun 2023 (16,7%) dan 2024 (16,7%). Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran ini terjadi kenaikan dari tahun ke tahun 2024 ke tahun 2025 yang secara berturut-turut sebesar 1.183.247 dan

1.326.189. Persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% menengah tahun 2025 juga menjadi persentase pengeluaran tertinggi jika dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Sementara, pada kelompok pengeluaran untuk 20% teratas, persentase pengeluaran tahun 2022 menjadi persentase pengeluaran terendah dibandingkan dua tahun lainnya. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran teratas ini pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.540.823, sementara pada tahun 2024 ada pada angka Rp. 6.551.667 dan tahun 2025 sebesar Rp. 5.716.442

3.5. Nilai Tingkat Ketimpangan Kecamatan Kota Depok Tahun 2025

3.5.1. Ketimpangan Kecamatan Sawangan Tahun 2025

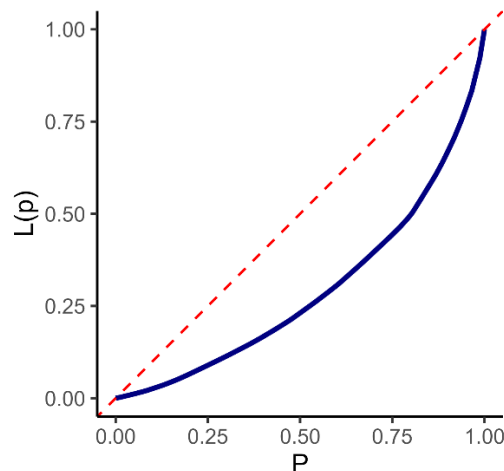
Pada tahun 2025 jumlah penduduk kecamatan Sawangan diproyeksikan mencapai 189.866 jiwa. Berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 10,6% (20.266 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata terendah yaitu Rp. 903.613 per bulan, dan hanya menguasai 2,82% total pendapatan. Sebaliknya kelompok dengan pengeluaran rata-rata tertinggi sebesar Rp. 11.645.705 per bulan sebesar 9,4% (17.817) menguasai 31,91% total pendapatan (Tabel 11). Hal ini mengindikasikan ketimpangan yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi ketimpangan di Kota Depok secara keseluruhan.

Tabel 11 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Sawangan

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$fp^*[F_c+F_c-1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
$\leq 1.132.135,3$	903.613	20.266	0,10674	18.312.626.723	0,0282	
1.138.764 – 1.627.254,2	1.406.235	20.512	0,10803	28.844.698.770	0,0444	0,0109
1.627.645 – 1.727.765,5	1.663.765	17.257	0,09089	28.711.592.588	0,0442	0,0173
1.738.696,6 – 2.030.886,3	1.855.873	20.350	0,10718	37.767.009.772	0,0581	0,0313
2.031.906,7 – 2.469.958,9	2.232.173	17.917	0,09437	39.993.836.743	0,0615	0,0388
2.473.186,5 – 2.755.095,3	2.590.960	17.904	0,0943	46.388.545.667	0,0713	0,0513
2.760.461 – 3.208.782,6	3.104.894	22.837	0,12028	70.906.457.626	0,109	0,0871

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_c-1]$
3.226.113,4 – 4.315.127,1	3.568.256	15.571	0,08201	55.561.321.613	0,0854	0,0754
5.258.082,8 – 7.129.047,4	5.981.342	19.435	0,10236	116.247.387.800	0,1788	0,1211
$\geq 7.129.047,4$	11.645.705	17.817	0,09384	207.491.523.191	0,3191	0,1577
Jumlah		189.866	1,00000	650.225.000.494	1,000000	0,5909
Gini Ratio 2025	0,409					

Nilai Gini Ratio kecamatan Sawangan tahun 2025 adalah 0,409, yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung oleh kurva Lorenz kecamatan Sawangan tahun 2025, yang memperlihatkan jarak antara kurva dan garis diagonalnya tidak terlalu lebar (Gambar 9).



Gambar 9 Kurva Lorenz Kecamatan Sawangan 2025

Berdasarkan pendekatan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat kecamatan Sawangan pada tahun 2025 adalah 40% penduduk kelompok terbawah menyumbang 21,0% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.457.372 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk 78.385 jiwa (41,28%). Sebanyak 40% penduduk kelompok menengah menguasai 35,8% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 2.622.917 per kapita per bulan, sedangkan 20% penduduk kelompok teratas berkontribusi terhadap 43,1% total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp 6.292.783 per kapita per bulan dari hanya 19,62% jumlah penduduk (37.252

jiwa). (Tabel 12). Namun, ketimpangan di kecamatan Sawangan menurut kriteria Bank Dunia masih masuk kriteria rendah, karena proporsi pendapatan kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk lebih dari 17%.

Tabel 12 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sawangan 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	78.385	1.457.372	114.236.071.084	21,0
40% menengah	74.229	2.622.917	194.696.497.692	35,8
20% teratas	37.252	6.292.783	234.418.734.887	43,1
	189.866	10.373.071	543.351.303.664	100

3.5.2. Ketimpangan Kecamatan Bojongsari Tahun 2025

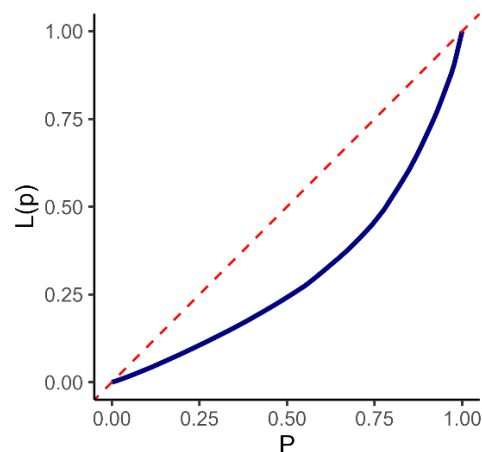
Jumlah penduduk kecamatan Bojongsari pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 143.562 jiwa. Berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 11,5% (16.438 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata per kapita terendah yaitu Rp. 846.685 per bulan, dan menguasai 4,34% total pendapatan. Sebaliknya kelompok dengan pengeluaran rata-rata per kapita tertinggi sebesar Rp. 6.801.133 per bulan sebesar 8,6% (12.275) menguasai 26,05% total pendapatan (Tabel 13). Hal ini mengindikasikan ketimpangan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi ketimpangan di Kota Depok secara keseluruhan.

Tabel 13 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Bojongsari

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=913.731,3	846.685	16.438	0,1145	13.917.802.057	0,0434	
988.191,2 – 1.050.763,2	1.010.937	15.154	0,10556	15.319.736.921	0,0478	0,0143
1.052.688 – 1.116.443,9	1.089.791	12.350	0,08603	13.458.918.308	0,042	0,0194
1.118.219,3 – 1.270.052,4	1.199.206	17.434	0,12144	20.906.965.180	0,0652	0,0403
1.293.696,8 – 1.412.492	1.346.076	12.055	0,08397	16.226.949.917	0,0506	0,0376

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_c-1]$
1.427.728,4 – 1.842.995,1	1.647.902	14.052	0,09788	23.156.316.372	0,0723	0,0558
1.890.546 – 2.335.552,8	2.092.081	17.416	0,12131	36.435.677.873	0,1137	0,0917
2.436.055,3 – 3.473.298,9	3.089.428	13.067	0,09102	40.369.550.345	0,126	0,0907
3.599.529,6 – 4.819.422	4.289.393	13.321	0,09279	57.139.007.350	0,1783	0,1207
$\geq 4.819.422$	6.801.133	12.275	0,0855	83.483.906.392	0,2605	0,1487
Jumlah		143.562	1,00000	320.414.830.715	1,000000	0,6192
Gini Ratio 2025	0,381					

Hasil perhitungan menunjukkan Nilai Gini Ratio kecamatan Bojongsari tahun 2025 sebesar 0,381, juga termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung oleh kurva Lorenz kecamatan Bojongsari tahun 2025, yang memperlihatkan jarak antara kurva dan garis diagonalnya tidak terlalu lebar (Gambar 10).



Gambar 10 Kurva Lorenz Kecamatan Bojongsari 2025

Berdasarkan pendekatan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat kecamatan Bojongsari pada tahun 2025 adalah 40% penduduk kelompok terbawah menyumbang 23,2% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.036.655 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk 61.376 jiwa (42,75%). Sebanyak 40% penduduk kelompok menengah menguasai 36,4% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.762.007 per kapita per bulan, sedangkan 20% penduduk kelompok teratas berkontribusi terhadap 40,4% total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran

Rp 4.318.023 per kapita per bulan dari hanya 17,83% jumlah penduduk (25.596 jiwa) (Tabel 14). Ketimpangan di kecamatan Bojongsari menurut kriteria Bank Dunia masih masuk kriteria rendah, karena proporsi pendapatan kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk lebih dari 17%.

Tabel 14 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Bojongsari 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	61.376	1.036.655	63.625.720.124	23,2
40% menengah	56.590	1.762.007	99.711.955.050	36,4
20% teratas	25.596	4.318.023	110.524.110.812	40,4
	143.562	7.116.684	273.861.785.986	100

3.5.3. Ketimpangan Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2025

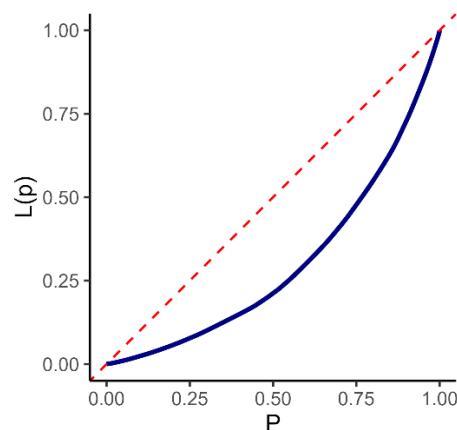
Jumlah penduduk kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 257.652 jiwa. Berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 12,05% (31.042 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata per kapita terendah yaitu Rp. 985.584 per bulan, dan menguasai 2,99% total pendapatan. Sebaliknya kelompok dengan pengeluaran rata-rata per kapita tertinggi sebesar Rp. 10.934.022 per bulan sebesar 9,4% (24.181 jiwa) menguasai 25,88% total pendapatan (Tabel 15). Hal ini mengindikasikan ketimpangan yang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi ketimpangan di Kota Depok secara keseluruhan.

Tabel 15 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Pancoran Mas

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.177.469,8	985.584	31.042	0,12048	30.594.502.968	0,0299	
1.186.948,6 – 1.517.855,9	1.373.265	21.168	0,08216	29.069.273.359	0,0285	0,0073
1.526.742,3 – 1.925.412,6	1.714.541	27.316	0,10602	46.834.402.636	0,0458	0,0173
1.972.388,9 – 2.047.635,7	1.992.182	23.703	0,092	47.220.691.297	0,0462	0,0234
2.088.287,2 – 2.912.394,9	2.493.629	27.606	0,10714	68.839.116.736	0,0674	0,0394
2.924.150,1 – 4.018.307,4	3.681.446	29.002	0,11256	106.769.289.302	0,1045	0,0608

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_c-1]$
4.049.708 – 4.807.913,8	4.438.667	21.057	0,08173	93.465.018.700	0,0915	0,0602
4.825.321,3 – 5.960.798,2	5.467.886	25.694	0,09972	140.491.851.433	0,1375	0,0962
6.106.158,6 – 8.482.268,1	7.213.433	26.883	0,10434	193.918.706.698	0,1898	0,1348
$\geq 8.482.268,1$	10.934.022	24.181	0,09385	264.395.580.947	0,2588	0,1634
Jumlah		257.652	1,00000	1.021.598.434.077	1,000000	0,6028
Gini Ratio 2025	0,397					

Hasil perhitungan menunjukkan Nilai Gini Ratio kecamatan Bojongsari tahun 2025 sebesar 0,397, masih termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung oleh kurva Lorenz kecamatan Bojongsari tahun 2025, yang memperlihatkan jarak antara kurva dan garis diagonalnya tidak terlalu lebar (Gambar 11).



Gambar 11 Kurva Lorenz Kecamatan Pancoran Mas 2025

Berdasarkan pendekatan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2025 adalah 40% penduduk kelompok terbawah menyumbang 17,4% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.516.393 per kapita per bulan, disumbang oleh 40% jumlah penduduk (103.229 jiwa). Sebanyak 40% penduduk kelompok menengah menguasai 39,8% dari total pengeluaran, dengan rata-rata Rp. 3.471.867 per kapita per bulan, sedangkan 20% penduduk kelompok teratas berkontribusi terhadap 42,8% total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp 7.563.335 per kapita per bulan dari hanya 19,82% jumlah penduduk (51.064

jiwa) (Tabel 16). Ketimpangan di kecamatan Pancoran Mas menurut kriteria Bank Dunia masih masuk kriteria rendah, karena proporsi pendapatan kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk lebih dari 17%.

Tabel 16 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Pancoran Mas 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	103.229	1.516.393	156.535.738.606	17,4
40% menengah	103.359	3.471.867	358.848.663.887	39,8
20% teratas	51.064	7.563.335	386.214.147.672	42,8
	257.652	12.551.595	901.598.550.164	100

3.5.4. Ketimpangan Kecamatan Cipayung Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Cipayung diproyeksikan mencapai 182.467 jiwa. Struktur pengeluaran penduduk menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas antar kelompok. Kelompok dengan pengeluaran paling rendah, yaitu rata-rata Rp924.131 per kapita per bulan, mencakup hampir seperlima dari total penduduk (19,2%). Sebaliknya, kelompok dengan pengeluaran tertinggi, yaitu rata-rata Rp9.479.784 per kapita per bulan, hanya mencakup 16,39% penduduk, namun menyerap porsi pendapatan yang jauh lebih besar (Tabel 17).

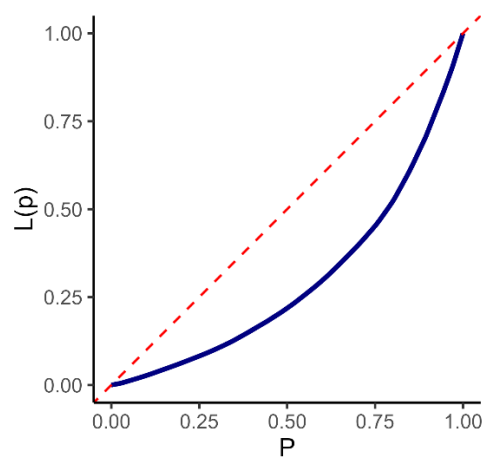
Tabel 17 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cipayung

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.108.005,6	924.131	19.209	0,10527	17.751.633.256	0,029	
1.125.715,8 - 1.282.441,6	1.203.957	17.786	0,09748	21.413.586.369	0,035	0,0091
1.285.589,9 - 1.532.301,6	1.366.855	17.930	0,09826	24.507.709.516	0,04	0,0166
1.546.482,2 - 1.964.924,4	1.766.953	18.211	0,0998	32.177.985.234	0,0526	0,026
1.967.049,1 - 2.362.442,3	2.130.693	20.359	0,11158	43.378.769.478	0,0708	0,0428
2.441.669,9 - 2.928.912,1	2.702.227	17.035	0,09336	46.032.443.985	0,0752	0,0495
3.031.834,4 - 3.600.988,1	3.360.883	19.850	0,10879	66.713.528.022	0,109	0,0777
3.828.057,6 - 5.229.050,3	4.373.915	16.342	0,08956	71.478.523.045	0,1167	0,0842

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_c-1]$
6.038.680,1 – 8.485.417,3	6.897.484	19.358	0,10609	133.521.503.794	0,2181	0,1352
$\geq 8.485.417,3$	9.479.784	16.387	0,08981	155.345.212.820	0,2537	0,1569
Jumlah		182.467	1,00000	612.320.895.519	1,000000	0,598
Gini Ratio 2025	0,402					

Distribusi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada kelompok menengah ke bawah, sementara kelompok menengah ke atas jumlahnya lebih sedikit tetapi menguasai proporsi pendapatan yang signifikan. Secara keseluruhan, hampir 59,92% penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp2.130.693 (sekitar 109.334 jiwa), sehingga memperlihatkan adanya konsentrasi pada kelompok pengeluaran menengah ke atas.

Hasil perhitungan Gini Ratio tahun 2025 menunjukkan angka 0,402, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cipayang berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan semakin melebar. Kondisi ini tercermin dalam kurva Lorenz yang memperlihatkan deviasi yang lebih nyata dari garis kesetaraan sempurna (Gambar 12).



Gambar 12 Kurva Lorenz Kecamatan Cipayang 2025

Jika dilihat berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi

pengeluaran penduduk Kecamatan Cipayung tahun 2025 menunjukkan pola yang cukup beragam antar kelompok. Kelompok 40% terbawah menyumbang sekitar 17,1% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp1.315.474. Sementara itu, kelompok 40% menengah memiliki porsi pengeluaran sebesar 36,8%, dengan rata-rata pengeluaran Rp2.817.153 per kapita per bulan. Adapun kelompok 20% teratas menguasai porsi terbesar, yaitu 46,2% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp7.277.971 (Tabel 18).

Proporsi ini memperlihatkan bahwa meskipun kelompok 40% terbawah hanya berkontribusi sekitar seperenam dari total pengeluaran, nilainya masih berada di atas ambang batas 17% yang ditetapkan Bank Dunia. Dengan demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cipayung pada tahun 2025 tergolong dalam kategori rendah, walaupun distribusi masih cukup timpang karena kelompok 20% teratas tetap mendominasi hampir setengah dari total pengeluaran.

Tabel 18 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cipayung 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	73.136	1.315.474	96.208.518.188	17,1
40% menengah	73.586	2.817.153	207.303.002.206	36,8
20% teratas	35.745	7.277.971	260.151.079.368	46,2
	182.467	11.410.598	563.662.599.761	100

3.5.5. Ketimpangan Kecamatan Sukmajaya Tahun 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 265.101 jiwa. Struktur pengeluaran penduduk menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas antar kelompok. Kelompok dengan pengeluaran paling rendah, yaitu rata-rata Rp735.608 per kapita per bulan, mencakup hampir lebih dari seperempat dari total penduduk (29,01%). Sebaliknya, kelompok dengan

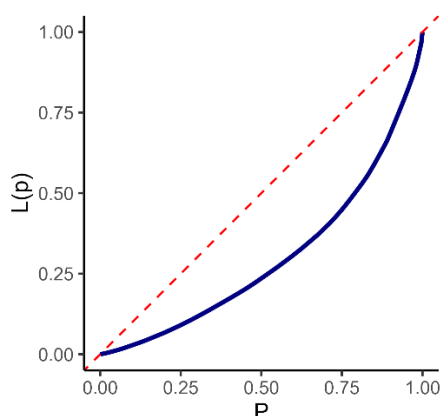
pengeluaran tertinggi, yaitu rata-rata Rp8.026.049 per kapita per bulan, hanya mencakup 25,99% penduduk, namun menyerap porsi pendapatan yang jauh lebih besar (Tabel 19).

Distribusi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada kelompok menengah ke bawah, sementara kelompok menengah ke atas jumlahnya lebih sedikit tetapi menguasai proporsi pendapatan yang signifikan. Secara keseluruhan, hampir 49,88% penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp1.852.379 (sekitar 132.232 jiwa), sehingga memperlihatkan adanya konsentrasi pada kelompok pengeluaran menengah ke atas.

Tabel 19 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Sukmajaya

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=881.701,8	735.608	29.014	0,10945	21.342.936.288	0,0316	
896.949,7 – 1.133.864,7	1.016.740	26.285	0,09915	26.725.005.116	0,0396	0,0102
1.182.507,2 – 1.356.612,1	1.263.950	27.596	0,1041	34.879.971.791	0,0517	0,0203
1.366.080,2 – 1.473.056,1	1.441.799	25.334	0,09556	36.526.541.740	0,0542	0,0287
1.514.245,2 – 1.769.672,9	1.622.856	24.659	0,09302	40.017.994.894	0,0593	0,0385
1.774.398,7 – 1.977.706,1	1.852.379	26.421	0,09966	48.941.700.494	0,0726	0,0544
1.998.137,9 – 2.471.274,5	2.229.058	29.073	0,10967	64.805.401.240	0,0961	0,0783
2.610.352,2 – 3.407.334,6	3.115.234	26.911	0,10151	83.834.062.576	0,1243	0,0949
3.458.638,8 – 6.066.624,8	4.564.935	23.822	0,08986	108.745.888.391	0,1613	0,1096
>=6.066.624,8	8.026.049	25.986	0,09802	208.564.909.162	0,3093	0,1657
Jumlah		265.101	1,00000	674.384.411.691	1,000000	0,6006
Gini Ratio 2025	0,399					

Hasil perhitungan Gini Ratio tahun 2025 menunjukkan angka 0,399, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Sukmajaya berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan semakin melebar. Kondisi ini tercermin dalam kurva Lorenz yang memperlihatkan deviasi yang lebih nyata dari garis kesetaraan sempurna (Gambar 13).



Gambar 13 Kurva Lorenz Kecamatan Sukmajaya 2025

Jika dilihat berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk Kecamatan Sukmajaya tahun 2025 menunjukkan pola yang cukup beragam antar kelompok. Kelompok 40% terbawah menyumbang sekitar 21,1% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp1.114.524 Sementara itu, kelompok 40% menengah memiliki porsi pengeluaran sebesar 37,0%, dengan rata-rata pengeluaran Rp1.974.284 per kapita per bulan. Adapun kelompok 20% teratas menguasai porsi terbesar, yaitu 41,9% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp4.799.271 (Tabel 20).

Proporsi ini memperlihatkan bahwa meskipun kelompok 40% terbawah hanya berkontribusi sekitar seperlima dari total pengeluaran, nilainya masih berada di atas ambang batas 17% yang ditetapkan Bank Dunia. Dengan demikian, tingkat ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2025 tergolong dalam kategori rendah. Walaupun demikian, dominasi kelompok 20% teratas yang hampir setara dengan kontribusi gabungan 40% terbawah dan 40% menengah tetap memperlihatkan adanya konsentrasi pengeluaran di kelompok atas.

Tabel 20 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sukmajaya 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	108.229	1.114.524	120.623.858.202	21,1
40% menengah	107.064	1.974.284	211.374.690.890	37,0
20% teratas	49.808	4.799.271	239.042.066.140	41,9
	265.101	7.888.078	571.040.615.233	100

3.5.6. Ketimpangan Kecamatan Cilodong Tahun 2025

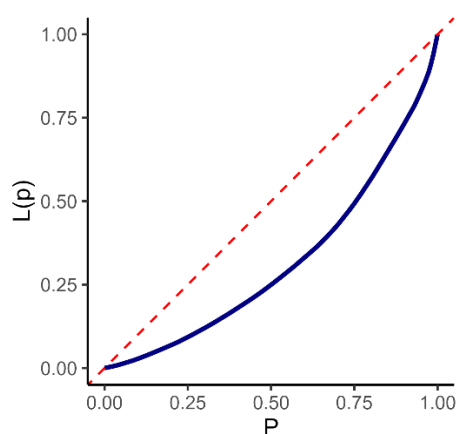
Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Cilodong diproyeksikan mencapai 177.584 jiwa. Struktur pengeluaran penduduk menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas antar kelompok. Kelompok dengan pengeluaran paling rendah, yaitu rata-rata Rp766.500 per kapita per bulan, mencakup hampir seperlima dari total penduduk (18.90%). Sebaliknya, kelompok dengan pengeluaran tertinggi, yaitu rata-rata Rp7.375.265 per kapita per bulan, hanya mencakup 16,78% penduduk, namun menyerap porsi pendapatan yang jauh lebih besar (Tabel 21).

Tabel 21 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cilodong

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$fp*[Fc+Fc-1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
$\leq 978.525,2$	766.500	18.899	0,10642	14.486.088.788	0,0302	
1.051.948,5 – 1.172.271,4	1.116.912	17.442	0,09822	19.481.176.894	0,0406	0,01
1.194.076,8 – 1.476.619,3	1.382.673	17.233	0,09704	23.827.603.189	0,0497	0,0186
1.518.402,2 – 1.745.625,4	1.644.250	17.879	0,10068	29.397.543.497	0,0613	0,0304
1.752.393,1 – 2.031.068,8	1.878.681	18.077	0,10179	33.960.918.633	0,0708	0,0442
2.103.277 – 2.324.497,7	2.202.747	17.216	0,09695	37.922.485.497	0,0791	0,0566
2.330.367,4 – 3.255.904,9	2.680.482	18.226	0,10263	48.854.457.647	0,1019	0,0785
3.275.350,6 – 4.074.297,9	3.745.263	17.836	0,10044	66.800.507.974	0,1393	0,1011
4.182.427,2 – 4.652.370,5	4.498.197	17.999	0,10135	80.963.044.713	0,1689	0,1332
$\geq 4.652.370,5$	7.375.265	16.777	0,09447	123.734.820.287	0,2581	0,1645
Jumlah		177.584	1,00000	479.428.647.119	1,000000	0,6371
Gini Ratio 2025	0,363					

Distribusi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk masih berada pada kelompok menengah ke bawah, sementara kelompok menengah ke atas jumlahnya lebih sedikit tetapi menguasai proporsi pendapatan yang signifikan. Secara keseluruhan, hampir 49,59% penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp2.202.747 (sekitar 88.063 jiwa), sehingga memperlihatkan adanya konsentrasi pada kelompok pengeluaran menengah ke atas.

Hasil perhitungan Gini Ratio tahun 2025 menunjukkan angka 0,363, meningkat 0.001 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cilodong berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan semakin melebar. Kondisi ini tercermin dalam kurva Lorenz yang memperlihatkan deviasi yang lebih nyata dari garis kesetaraan sempurna (Gambar 14).



Gambar 14 Kurva Lorenz Kecamatan Cilodong 2025

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk Kecamatan Cilodong tahun 2025 menunjukkan pola yang cukup beragam antar kelompok. Kelompok 40% terbawah menyumbang sekitar 21,3% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp1.227.584. Sementara itu, kelompok 40% menengah memiliki porsi pengeluaran sebesar 40,9%, dengan rata-rata pengeluaran Rp2.365.347 per kapita per bulan. Adapun kelompok 20% teratas menguasai porsi terbesar, yaitu 37,8% dari total

pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencapai Rp8.073.352 (Tabel 22).

Jika dibandingkan dengan kriteria Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah yang mencapai lebih dari 20% menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Cilodong pada tahun 2025 tergolong rendah. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran di Cilodong relatif lebih seimbang, karena kontribusi kelompok menengah cukup dominan, sementara kelompok teratas tidak terlalu mendominasi dibandingkan dengan total pengeluaran keseluruhan.

Tabel 22 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cilodong 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	71.453	1.227.584	87.714.541.530	21,3
40% menengah	71.355	2.365.347	168.779.336.727	40,9
20% teratas	34.776	4.480.422	155.811.143.300	37,8
	177.584	8.073.352	412.305.021.557	100

3.5.7. Ketimpangan Kecamatan Cimanggis Tahun 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Cimanggis pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 264.779 jiwa. Distribusi pengeluaran menunjukkan bahwa kelompok dengan rata-rata pengeluaran terendah, yaitu sekitar Rp913.046 per kapita per bulan, mencakup 29.466 jiwa atau 11,1% dari total penduduk, dengan kontribusi hanya 2,4% dari total pengeluaran. Sebaliknya, kelompok dengan rata-rata pengeluaran tertinggi sebesar Rp10.244.023 per kapita per bulan hanya mencakup 24.752 jiwa (9,3%), tetapi menguasai sekitar 22,8% dari keseluruhan pengeluaran (Tabel 23).

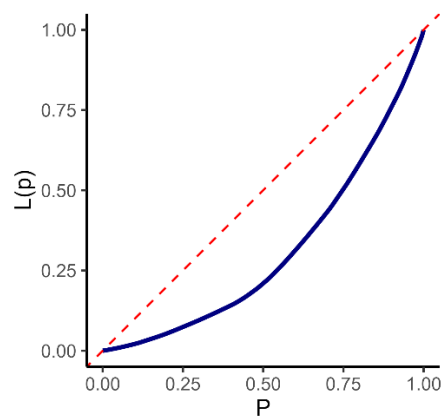
Jika dilihat secara keseluruhan, kelompok berpendapatan menengah ke bawah masih mendominasi jumlah penduduk. Misalnya, pada kelompok dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp3 juta (empat kelompok

pertama), terdapat sekitar 106.447 jiwa atau 40,2% dari total penduduk, namun hanya menyumbang 14,4% dari total pengeluaran (akumulasi %C sampai baris ke-4). Sebaliknya, kelompok menengah ke atas meskipun jumlahnya lebih sedikit, justru menyerap porsi pengeluaran yang jauh lebih besar. Contohnya, dua kelompok teratas (pengeluaran rata-rata Rp7,5 juta ke atas) hanya mencakup 49.505 jiwa atau 18,7% dari total penduduk, tetapi menguasai hampir 45,1% dari total pengeluaran. Hal ini tercermin dari kolom %C yang menunjukkan konsentrasi pengeluaran semakin tinggi pada kelompok atas.

Tabel 23 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cimanggis

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.118.965,2	913.046	29.466	0,11129	26.903.828.091	0,0241	
1.272.101,2 – 1.655.020,3	1.444.445	27.664	0,10448	39.959.125.781	0,0359	0,0088
1.675.816,9 – 1.855.098	1.756.564	23.256	0,08783	40.850.651.519	0,0367	0,0138
1.877.225,9 – 2.025.219,4	1.958.410	26.161	0,0988	51.233.970.415	0,046	0,0237
2.089.159,1 – 3.607.162,8	2.914.308	26.657	0,10068	77.686.715.413	0,0697	0,0358
3.607.876,1 – 4.782.140,7	4.378.927	27.440	0,10363	120.157.758.625	0,1078	0,0552
4.837.902,9 – 5.246.816,1	5.078.318	25.024	0,09451	127.079.837.086	0,1141	0,0713
5.512.996,9 – 6.940.759,6	6.344.854	27.656	0,10445	175.473.273.124	0,1575	0,1072
6.982.376,1 – 8.251.928,3	7.536.272	26.703	0,10085	201.241.069.679	0,1806	0,1376
>=8.251.928,3	10.244.023	24.752	0,09348	253.560.046.173	0,2276	0,1657
Jumlah		264.779	1,00000	1.114.146.275.907	1,000000	0,6191
Gini Ratio 2025	0,381					

Hasil perhitungan Gini Ratio tahun 2025 menunjukkan angka 0,381, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cimanggis berada pada kategori sedang, dengan kecenderungan semakin melebar. Kondisi ini tercermin dalam kurva Lorenz yang memperlihatkan deviasi yang lebih nyata dari garis kesetaraan sempurna (Gambar 15).



Gambar 15 Kurva Lorenz Kecamatan Cimanggis 2025

Distribusi pengeluaran penduduk Kecamatan Cimanggis pada tahun 2025 menunjukkan adanya ketimpangan antar kelompok, meskipun tidak terlalu tajam. Kelompok 40% terbawah yang berjumlah 106.547 jiwa, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Rp1.518.116, hanya menyumbang 16,5% dari total pengeluaran. Selanjutnya, kelompok 40% menengah yang terdiri dari 106.777 jiwa memiliki rata-rata pengeluaran Rp4.011.984 per kapita per bulan dan menguasai porsi terbesar, yakni 43,6% dari total pengeluaran. Sementara itu, kelompok 20% teratas yang jumlah penduduknya lebih sedikit, yaitu 51.455 jiwa, justru menguasai hampir sebanding dengan kelompok menengah, yakni 39,9% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Rp7.617.397 (Tabel 24).

Berdasarkan ukuran Bank Dunia, proporsi pengeluaran kelompok 40% terbawah yang berada di atas batas minimal 17% sedikit lebih rendah, yakni 16,5%, sehingga tingkat ketimpangan di Cimanggis pada tahun 2025 masih dapat dikategorikan sedang. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun kelompok menengah mendominasi distribusi pengeluaran, konsentrasi pada kelompok atas masih cukup kuat dan memperlebar kesenjangan dengan kelompok terbawah.

Tabel 24 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cimanggis 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	106.547	1.518.116	161.750.750.194	16,5
40% menengah	106.777	4.011.984	428.387.588.802	43,6
20% teratas	51.455	7.617.397	391.953.174.966	39,9
	264.779	13.147.497	982.091.513.962	100

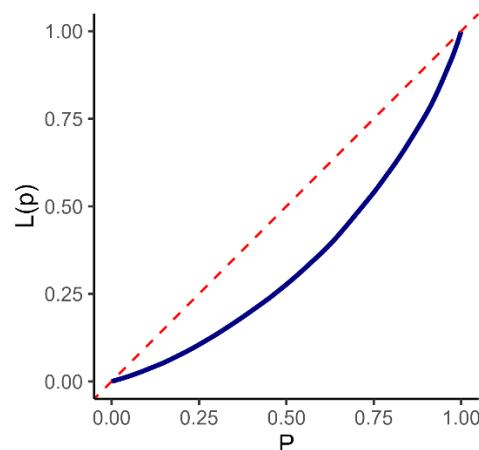
3.5.8. Ketimpangan Kecamatan Tapos Tahun 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Tapos pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 277.590 jiwa. Berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 10% (27.788 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata terendah yaitu Rp. 990.912 per bulan, sementara 9,8% (27.390 jiwa) menempati kelompok dengan pengeluaran tertinggi rata-rata sebesar Rp7.000.247 per bulan. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 49,4% dari jumlah penduduk (sekitar 138.416 ribu jiwa) yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan lebih dari Rp2.471.822 (Tabel 25).

Tabel 25 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Tapos

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.176.108,5	990.912	27.788	0,1001	27.535.473.911	0,0336	
1.182.654,6 – 1.452.151,2	1.319.921	27.939	0,10065	36.877.282.670	0,045	0,0113
1.461.525,1 – 1.876.450,1	1.673.950	28.227	0,10169	47.250.588.439	0,0576	0,0219
1.882.971,1 – 2.092.951,3	1.976.902	28.288	0,10191	55.922.597.493	0,0682	0,0347
2.101.957,5 – 2.469.192,3	2.247.019	26.932	0,09702	60.516.708.554	0,0738	0,0468
2.471.822,1 – 2.761.835,9	2.653.404	28.112	0,10127	74.592.482.723	0,091	0,0656
2.876.698,5 – 3.578.394,5	3.339.382	29.690	0,10696	99.146.241.367	0,1209	0,0919
3.588.788,8 – 4.068.146	3.843.535	26.719	0,09625	102.695.422.409	0,1252	0,1064
4.203.354,7 – 5.264.895,5	4.671.879	26.505	0,09548	123.828.146.275	0,151	0,1319
>=5.264.895,5	7.000.247	27.390	0,09867	191.736.773.049	0,2338	0,1743
Jumlah		277.590	1,00000	820.101.716.890	1,000000	0,6848
Gini Ratio 2025	0,315					

Nilai Gini Ratio Kecamatan Tapos tahun 2025 tercatat sebesar 0,315, yang menempatkan wilayah ini dalam kategori ketimpangan sedang. Artinya, distribusi pengeluaran antarpenduduk belum sepenuhnya merata, meskipun kesenjangan antara kelompok bawah dan kelompok atas tidak tergolong tajam. Kondisi ini tergambar jelas pada Kurva Lorenz Kecamatan Tapos (Gambar 16), di mana kurva distribusi pengeluaran terlihat menyimpang dari garis diagonal pemerataan sempurna, namun tidak menunjukkan pelebaran yang ekstrem.



Gambar 16 Kurva Lorenz Kecamatan Tapos 2025

Berdasarkan pendekatan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, struktur pengeluaran penduduk Kecamatan Tapos pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 40% penduduk terbawah menyumbang 22,9% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.490.421 per kapita per bulan, 40% penduduk menengah menyumbang 42,1% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 2.759.817 per kapita per bulan, 20% penduduk teratas menyumbang 35,0% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 4.749.165 per kapita per bulan (Tabel 26). Dengan komposisi tersebut, Kecamatan Tapos tahun 2025 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah menurut ukuran Bank Dunia, karena porsi pengeluaran 40% kelompok terbawah berada di atas ambang batas 17% dari total pengeluaran penduduk.

Tabel 26 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Tapos 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	112.242	1.490.421	167.287.878.748	22,9
40% menengah	111.453	2.759.817	307.589.852.979	42,1
20% teratas	53.895	4.749.165	255.956.253.305	35,0
	277.590	8.999.403	730.833.985.032	100

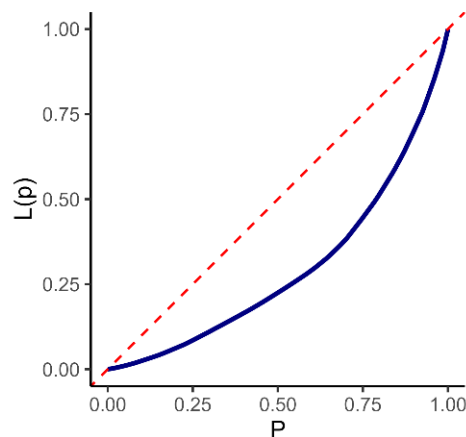
3.5.9. Ketimpangan Kecamatan Beji Tahun 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Beji pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 180.459 jiwa. Dari distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 13,2% (23.822 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata terendah yaitu Rp. 867.225 per kapita per bulan, sementara sekitar 9,9% (17.875 jiwa) menempati kelompok dengan pengeluaran tertinggi rata-rata sebesar Rp9.687.783 per kapita per bulan. Jika dilihat lebih lanjut, hampir 48,2% dari total penduduk yakni 180.459 ribu jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp. 2.091.928,8 (Tabel 27).

Tabel 27 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Beji

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.059.443,7	867.225	23.822	0,13201	20.659.044.346	0,0355	
1.119.735,8 – 1.358.336,6	1.278.138	13.776	0,07634	17.607.627.272	0,0302	0,0078
1.365.524 – 1.712.173,5	1.604.438	16.554	0,09173	26.559.863.482	0,0456	0,0163
1.724.644,6 – 1.784.372,3	1.747.132	19.568	0,10843	34.187.874.977	0,0587	0,0305
1.794.471,8 – 2.035.830,5	1.957.591	19.708	0,10921	38.580.211.097	0,0662	0,0444
2.091.928,8 – 2.351.485,1	2.177.393	15.162	0,08402	33.013.625.879	0,0567	0,0445
2.363.884,9 – 3.474.131,2	2.942.483	18.169	0,10068	53.461.976.842	0,0918	0,0682
4.092.465,2 – 5.165.810	4.409.305	18.645	0,10332	82.211.497.178	0,1411	0,0941
5.229.252,3 – 6.930.622,1	6.000.672	17.180	0,0952	103.091.550.690	0,177	0,117
>=6.930.622,1	9.687.783	17.875	0,09905	173.169.117.079	0,2973	0,1687
Jumlah		180.459	1,00000	582.542.388.842	1,000000	0,5915
Gini Ratio 2025	0,409					

Nilai Gini Ratio Kecamatan Beji tahun 2025 sebesar 0,409, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah ini masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Beji untuk tahun 2025, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 17).



Gambar 17 Kurva Lorenz Kecamatan Beji 2025

Berdasarkan pendekatan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat Kecamatan Beji pada tahun 2025 adalah 40% penduduk terbawah menyumbang 20,1% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.374.233 per kapita per bulan, 40% penduduk menengah menguasai 36,8% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 2.585.688 per kapita per bulan, dan 20% penduduk teratas menyumbang 43,1% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp6.186.349 per kapita per bulan (Tabel 28). Dengan komposisi tersebut, Kecamatan Beji tahun 2025 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah menurut ukuran Bank Dunia, karena porsi pengeluaran 40% kelompok terbawah berada di atas ambang batas 17% dari total pengeluaran penduduk.

Tabel 28 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Beji 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	73.720	1.374.233	101.308.473.508	20,1
40% menengah	71.684	2.585.688	185.352.433.582	36,8
20% teratas	35.055	6.186.349	216.862.452.602	43,1
	180.459	10.146.270	503.523.359.692	100

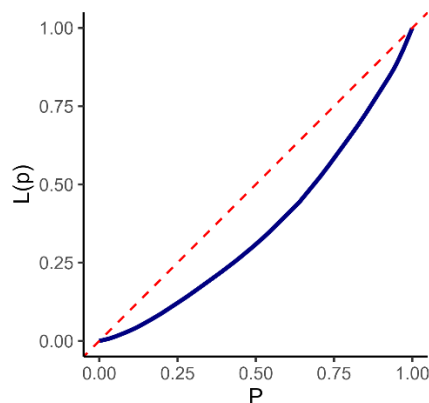
3.5.10. Ketimpangan Kecamatan Limo Tahun 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Limo pada tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 122.457 jiwa. Dari distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 10,7% (13.145 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata terendah yaitu Rp. 912.496 per kapita per bulan, sedangkan kelompok dengan pengeluaran rata-rata tertinggi, yaitu Rp. 5.532.990 per kapita per bulan, dihuni oleh 7,6% penduduk (9.331 jiwa). Secara keseluruhan, sekitar 47,5% dari penduduk (58.215 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp. 2.476.633 (Tabel 29).

Tabel 29 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Limo

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.164.659,4	912.496	13.145	0,10734	11.994.764.564	0,0372	
1.214.857 – 1.725.062,8	1.504.523	13.221	0,10796	19.891.295.728	0,0616	0,0147
1.727.072,4 – 1.867.084,2	1.773.919	11.016	0,08996	19.541.486.578	0,0605	0,0233
1.881.247,4 – 1.981.085,5	1.913.399	11.889	0,09709	22.748.399.981	0,0705	0,0378
2.015.247,4 – 2.324.560,5	2.172.503	14.971	0,12226	32.524.537.274	0,1007	0,0685
2.476.633,6 – 2.614.980,6	2.581.476	10.398	0,08491	26.842.188.617	0,0831	0,0632
2.644.007,6 – 3.272.434,8	3.049.063	11.992	0,09793	36.564.357.806	0,1133	0,0921
3.465.367,1 – 3.640.141,3	3.570.873	11.676	0,09535	41.693.512.944	0,1291	0,1128
3.677.158,7 – 4.149.950,8	4.010.388	14.818	0,12101	59.425.927.571	0,1841	0,181
>=4.149.950,8	5.532.990	9.331	0,0762	51.628.330.790	0,1599	0,1402
Jumlah		122.457	1,00000	322.854.801.852	1,000000	0,7336
Gini Ratio 2025	0,266					

Nilai Gini Ratio Kecamatan Limo tahun 2025 sebesar 0,266, yang berarti tingkat ketimpangan di wilayah ini termasuk dalam kategori rendah hingga sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Limo untuk tahun 2025, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 18).



Gambar 18 Kurva Lorenz Kecamatan Limo 2025

Berdasarkan pendekatan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, distribusi pengeluaran di Kecamatan Limo pada tahun 2025 adalah 40% penduduk terbawah menyumbang 24,9% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.526.084 per kapita per bulan, 40% penduduk menengah menguasai 43,1% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 2.650.314 per kapita per bulan, dan 20% penduduk teratas menyumbang 31,9% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 3.986.383 per kapita per bulan (Tabel 30). Dengan melihat data tersebut, ketimpangan di Kecamatan Limo menurut standar Bank Dunia tergolong rendah, karena proporsi pendapatan kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk melebihi 17%, yang menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata.

Tabel 30 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Limo 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	49.271	1.526.084	75.191.692.284	24,9
40% menengah	49.037	2.650.314	129.963.444.317	43,1
20% teratas	24.149	3.986.383	96.267.163.628	31,9
	122.457	8.162.781	301.422.300.228	100

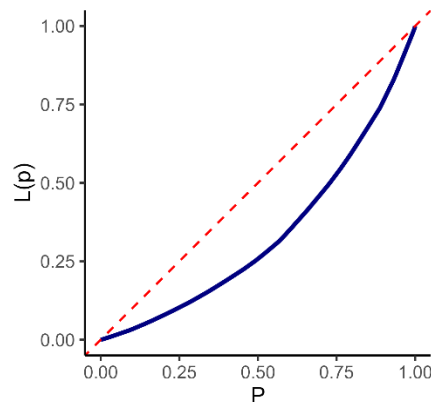
3.5.11. Ketimpangan Kecamatan Cinere Tahun 2025

Jumlah penduduk Kecamatan Cinere pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 106.459 jiwa. Berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita per bulan, sekitar 10,1% (10.798 jiwa) berada pada kelompok dengan pengeluaran rata-rata terendah yaitu Rp. 1.087.291 per bulan, sedangkan kelompok dengan pengeluaran rata-rata tertinggi sebesar Rp. 7.816.912 per bulan sebesar 8,6% (9.185 jiwa). Secara umum, sekitar 49,5% dari total penduduk (52.632 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas Rp2.627.564 (Tabel 31).

Tabel 31 Hitung Gini Ratio Tahun 2025 di Kecamatan Cinere

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$fp^*[Fc+Fc-1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.276.905,7	1.087.291	10.798	0,10143	11.740.569.673	0,0341	
1.373.460,7 – 1.541.496	1.452.164	10.837	0,1018	15.737.097.400	0,0457	0,0116
1.559.700,9 – 1.842.764,2	1.698.659	13.234	0,12431	22.480.053.255	0,0652	0,028
1.861.407 – 2.086.517,1	2.003.022	9.623	0,09039	19.275.080.328	0,0559	0,0313
2.099.396,4 – 2.554.609,7	2.267.324	9.335	0,08769	21.165.470.980	0,0614	0,0406
2.627.564 – 3.572.946,8	2.994.857	10.534	0,09895	31.547.818.466	0,0916	0,061
3.640.212,4 – 3.926.442,5	3.783.600	12.364	0,11614	46.780.433.144	0,1358	0,098
4.108.602,3 – 5.000.931,2	4.561.582	9.903	0,09302	45.173.345.796	0,1311	0,1033
5.092.335,2 – 6.613.834,1	5.526.218	10.646	0,1	58.832.116.381	0,1708	0,1412
>=6.613.834,1	7.816.912	9.185	0,08628	71.798.332.951	0,2084	0,1546
Jumlah		106.459	1,00000	344.530.318.372	1,000000	0,6696
Gini Ratio 2025	0,330					

Nilai Gini Ratio Kecamatan Cinere tahun 2025 adalah 0,330, yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung oleh kurva Lorenz Kecamatan Cinere tahun 2025, yang memperlihatkan jarak antara kurva dan garis diagonalnya tidak terlalu lebar (Gambar 19).



Gambar 19 Kurva Lorenz Kecamatan Cinere 2025

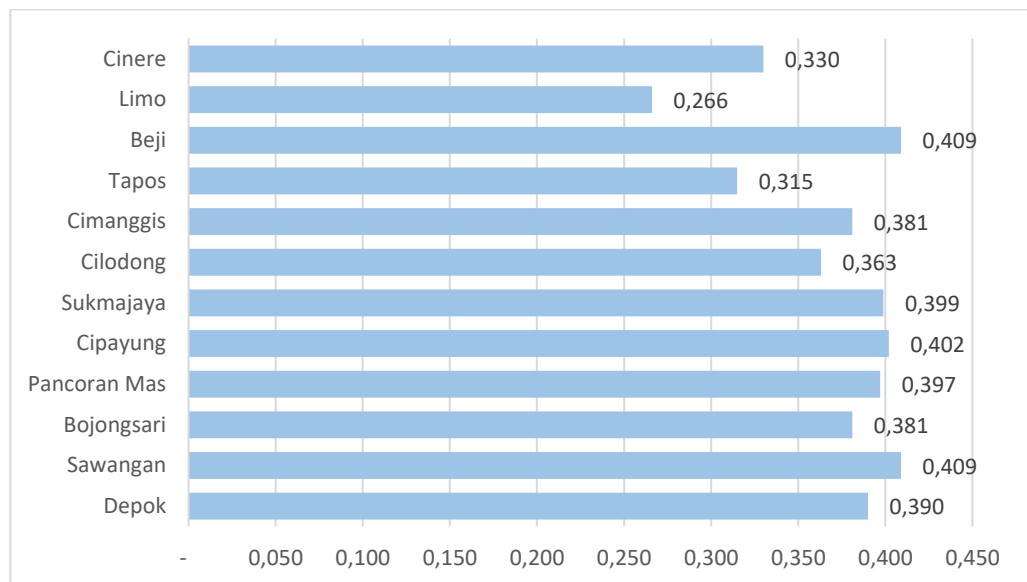
Berdasarkan pendekatan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat Cinere pada tahun 2025 adalah 40% penduduk terbawah menyumbang 21,9% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 1.560.284 per kapita per bulan, 40% penduduk menengah menguasai 41,4% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp. 3.118.944 per kapita per bulan, 20% penduduk teratas menyumbang 36,7% dari total pengeluaran, dengan rata-rata pengeluaran Rp5.883.300 per kapita per bulan. Dengan melihat data tersebut, ketimpangan di Kecamatan Cinere menurut standar Bank Dunia tergolong rendah, karena proporsi pendapatan kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk melebihi 17%, yang menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata (Tabel 32).

Tabel 32 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cinere 2025

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	44.492	1.560.284	69.420.152.860	21,9
40% menengah	42.136	3.118.944	131.419.815.129	41,4
20% teratas	19.831	5.883.300	116.671.725.126	36,7
	106.459	10.562.528	317.511.693.115	100

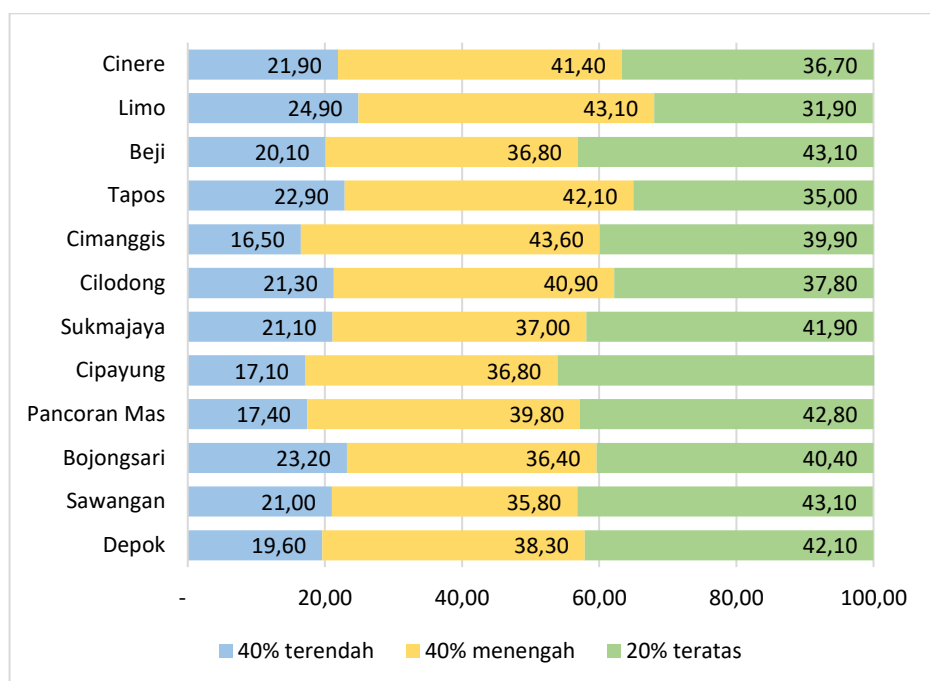
3.6. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok Tahun 2025

Pada tahun 2025, nilai *gini ratio* kecamatan di Kota Depok berkisar antara 0,266 (Kecamatan Limo) sampai 0,409 (Kecamatan Beji dan Sawangan), sedangkan nilai *gini ratio* Kota Depok sebesar 0,390. Dari 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, sebanyak 5 kecamatan memiliki nilai *gini ratio* di atas Kota Depok, yaitu Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cipayung, Pancoran Mas, dan Sawangan, sedangkan 6 kecamatan lainnya nilai *gini ratio* nya di bawah Kota Depok (Gambar 22). Seluruh kecamatan di Kota Depok masih terkategori ketimpangan sedang, karena semua nilai *gini ratio* di bawah 0.5. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada indikasi bahwa nilai *gini ratio* beberapa kecamatan di Kota Depok cenderung meningkat yang memerlukan perhatian dari pemerintah agar kecenderungan tersebut tidak berlanjut.



Gambar 20 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Kota Depok 2025

Selain dari nilai *gini ratio*, perbandingan ketimpangan antar kecamatan di Kota Depok dapat dilihat berdasarkan kriteria bank dunia, yaitu dengan mengukur persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Berdasarkan kriteria ini, hampir semua kecamatan di Kota Depok kecuali Kecamatan Cimanggis berada dalam kategori ketimpangan rendah. Hal ini dikarenakan persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk berada di atas angka 17% (Gambar 23). Kecamatan Cimanggis menurut kriteria Bank Dunia terkategori ketimpangan sedang, karena persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk sebesar 16.5% yang lebih kecil dari 17%.



Gambar 21 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok 2025

Jika dibandingkan antar kecamatan, nilai tertinggi dari persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk dimiliki oleh Kecamatan Limo dengan nilai 24,90. Sementara itu, nilai terendah dimiliki oleh Kecamatan Cimanggis dengan nilai 16,50. Jika membandingkan persentase kelompok pengeluaran 40% menengah, persentase tertinggi dimiliki oleh Kecamatan Cipayung dengan nilai 46,10, sedangkan persentase terendah dimiliki oleh kecamatan Sawangan dengan nilai 35,80. Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, persentase tertinggi adalah Kecamatan Beji dan Sawangan dengan nilai 43,10, sementara persentase terendah adalah Kecamatan Tapos dengan nilai 35,50.

3.7 Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok tahun 2023-2025

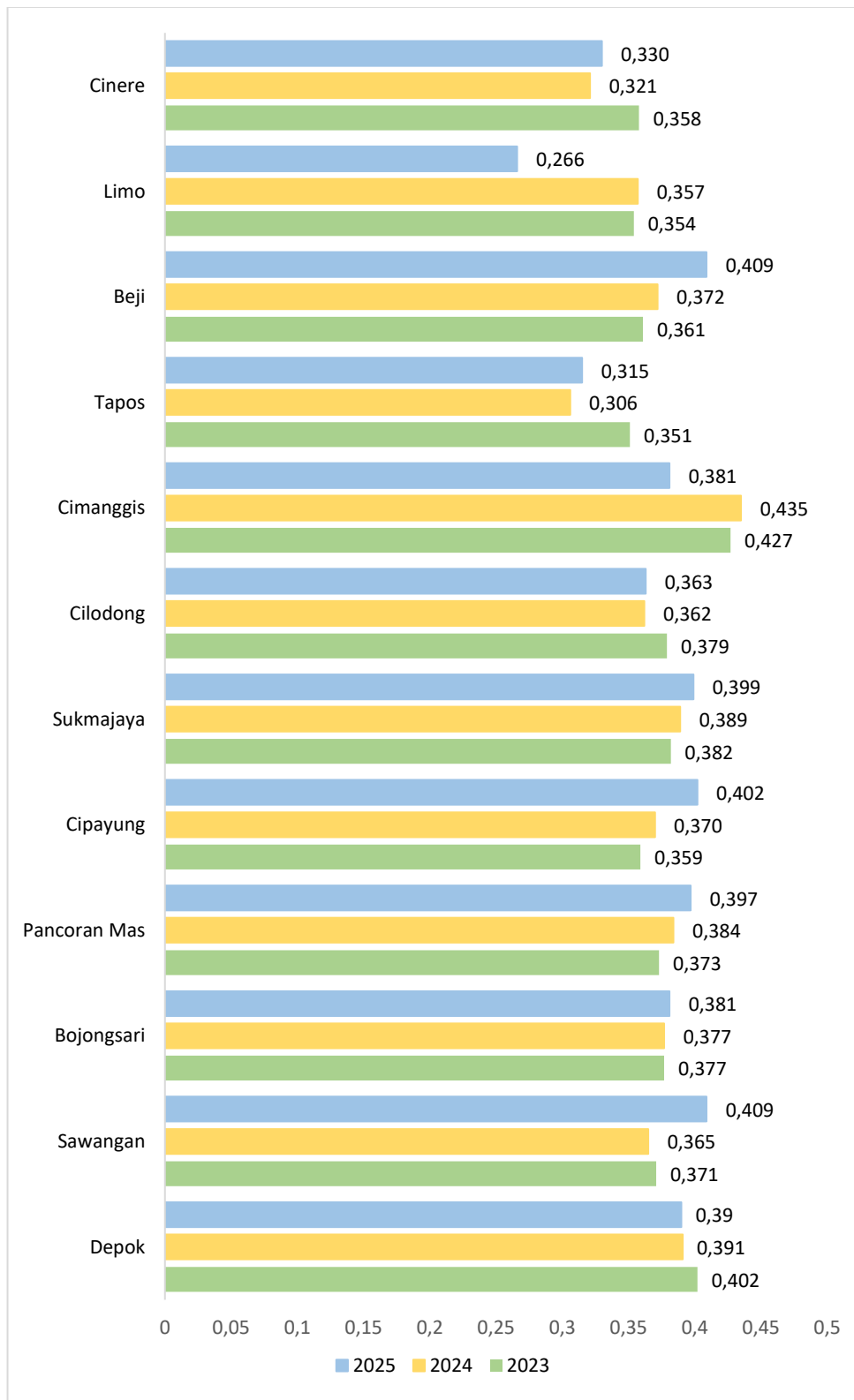
Ketimpangan antar kecamatan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir (2023-2025) secara umum berada pada kategori ketimpangan sedang, dengan

sebagian besar nilai Gini ratio berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Meskipun demikian, pada tahun 2025, Kecamatan Limo tercatat berada pada kategori ketimpangan rendah dengan nilai Gini ratio 0,266. Selama periode tiga tahun ini, tidak ada kecamatan di Kota Depok yang masuk dalam kategori ketimpangan tinggi (nilai Gini ratio lebih dari 0,5).

Nilai Gini ratio tertinggi terjadi di Kecamatan Cimanggis pada tahun 2024 (0,435). Sementara itu, nilai Gini ratio terendah terjadi di Kecamatan Limo pada tahun 2025 (0,266), yang menunjukkan penurunan ketimpangan yang signifikan di wilayah tersebut pada tahun tersebut.

Pergerakan nilai Gini ratio di kecamatan-kecamatan Kota Depok selama periode 2023-2025 memiliki pola yang beragam. Sejumlah kecamatan menunjukkan nilai Gini ratio yang cenderung naik secara konsisten, yaitu Beji, Cilodong, Sukmajaya, Cipayung, dan Pancoran Mas. Kecamatan Bojongsari juga dapat dikategorikan cenderung naik, meskipun sempat stagnan pada tahun 2023-2024.

Di sisi lain, wilayah Depok (secara agregat) menunjukkan tren yang cenderung turun tipis. Kecamatan lainnya menunjukkan pola yang fluktuatif. Kecamatan Cinere, Tapos, dan Sawangan mengalami penurunan di tahun 2024 sebelum kembali naik di tahun 2025. Sebaliknya, Kecamatan Limo dan Cimanggis mengalami kenaikan di tahun 2024 sebelum akhirnya mencatatkan penurunan di tahun 2025.



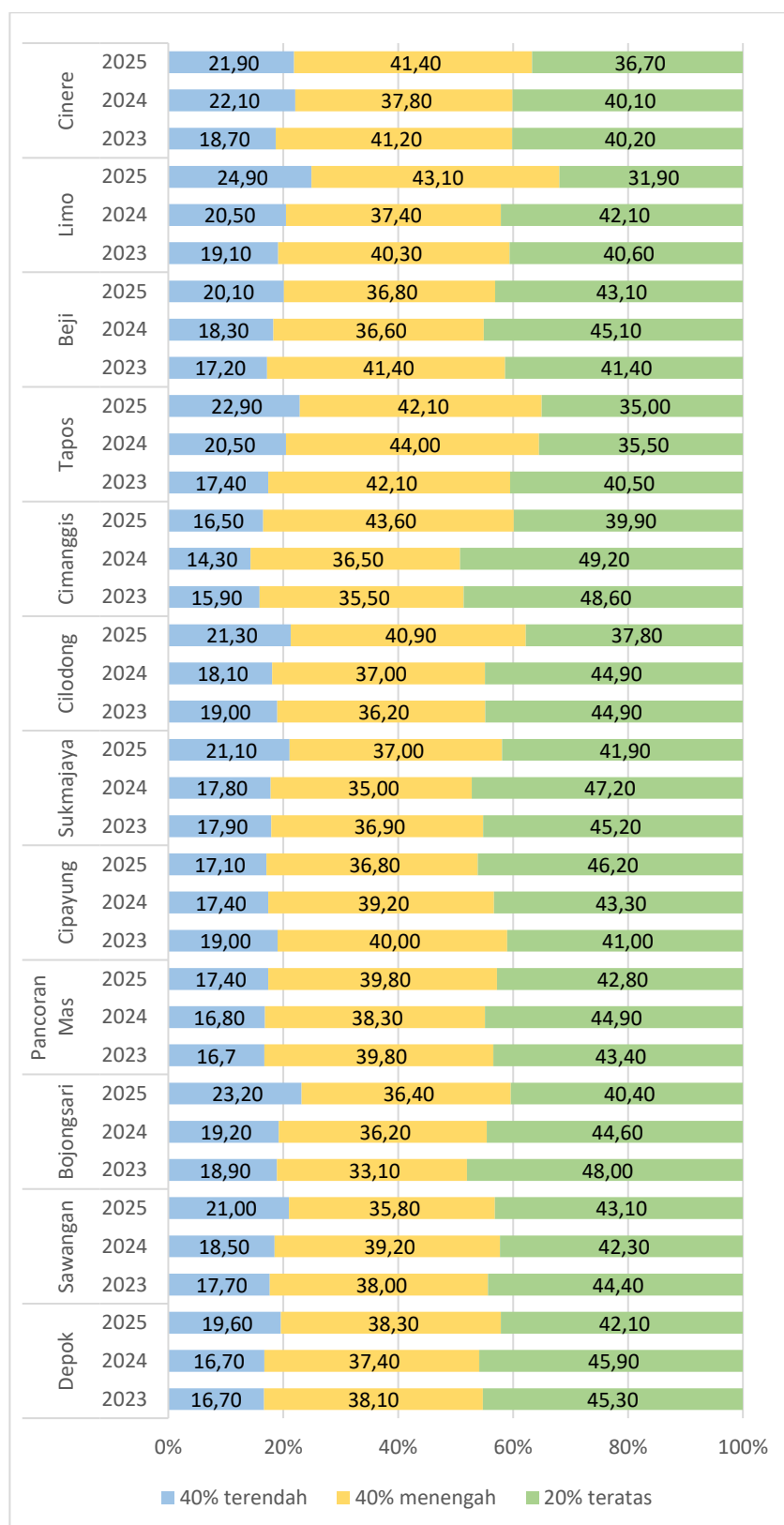
Gambar 22 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Kota Depok Tahun 2023 – 2025

Jika dilihat dari tren tahunan, sebagian besar kecamatan mengalami kenaikan Gini Ratio dari 2023 ke 2025, meskipun kenaikan tersebut tidak signifikan. Misalnya, Kecamatan Sukmajaya meningkat dari 0,382 (2023) menjadi 0,399 (2025), sementara Tapos naik dari 0,306 ke 0,315. Namun, secara keseluruhan Kota Depok menunjukkan tren fluktuatif, yang justru mengalami sedikit penurunan dari 0,402 di 2023 menjadi 0,390 di 2025. Perubahan ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan ekonomi di beberapa wilayah mulai menunjukkan hasil, meskipun belum merata di seluruh kecamatan. Secara rata-rata, nilai Gini Ratio Kecamatan di Kota Depok masih berada pada kategori ketimpangan sedang, dengan kisaran 0,36–0,40. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesenjangan ekonomi yang cukup terasa. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan pendapatan perlu difokuskan pada kecamatan dengan nilai Gini Ratio tinggi seperti Cimanggis, Beji, dan Sawangan.

Jika membandingkan pola antar tahun, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang menunjukkan penurunan Gini Ratio secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masih belum stabil dan cenderung fluktuatif mengikuti dinamika ekonomi lokal. Beberapa kecamatan seperti Cinere dan Pancoran Mas memperlihatkan stabilitas nilai di kisaran 0,32–0,40, menandakan ketimpangan yang relatif konstan. Sementara itu, Cipayung menunjukkan peningkatan cukup tajam dari 0,359 (2023) menjadi 0,402 (2025), yang mengindikasikan melemahnya pemerataan ekonomi di wilayah tersebut. Pola ini bisa disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan, akses pekerjaan, dan aktivitas ekonomi antar wilayah. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran bahwa meskipun Kota Depok relatif stabil dalam pemerataan ekonomi, tetap diperlukan intervensi kebijakan berbasis wilayah untuk menekan ketimpangan yang muncul terutama di wilayah dengan Gini Ratio tinggi.

Kelompok pengeluaran masyarakat berdasarkan ukuran Bank Dunia di setiap kecamatan Kota Depok selama tahun 2023 hingga 2025 disajikan pada Gambar 23, yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 40% terbawah, 40%

menengah, dan 20% teratas. Secara umum, sebagian besar kecamatan menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara kelompok menengah dan atas, dengan kisaran sekitar 35–45 persen untuk masing-masing. Namun, terlihat bahwa kelompok 40% terbawah masih mendominasi di beberapa kecamatan seperti Limo (24,9%) dan Cinere (21,9%) pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya segmen masyarakat dengan daya beli rendah cukup signifikan. Sementara itu, kecamatan seperti Cimanggis dan Cipayung menunjukkan proporsi kelompok 20% teratas yang relatif lebih besar, yaitu sekitar 48–49% pada tahun 2025, yang menandakan ketimpangan yang cukup tinggi antar lapisan masyarakat. Pola ini menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran antar kecamatan di Depok masih belum merata dan menunjukkan adanya ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Hal ini sejalan dengan temuan pada Gini Ratio sebelumnya, di mana kecamatan dengan proporsi kelompok atas yang tinggi juga cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang besar.

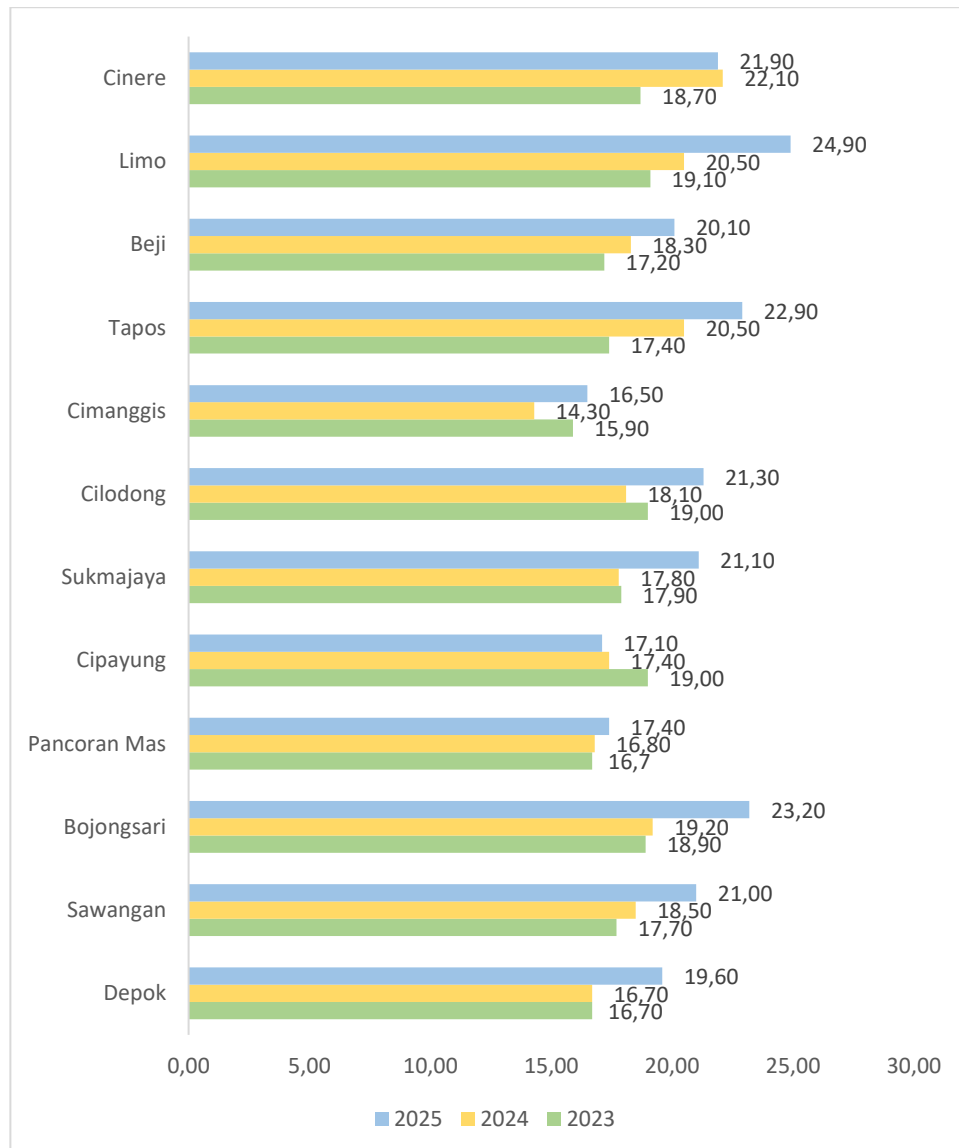


Gambar 23 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok Tahun 2023 – 2025

Dari segi tren tahunan, sebagian besar kecamatan menunjukkan peningkatan proporsi kelompok 40% terbawah dari tahun 2023 ke 2025, yang dapat diartikan sebagai indikasi meluasnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Misalnya, di Kecamatan Beji, proporsi kelompok bawah naik dari 17,2% (2023) menjadi 20,1% (2025), dan di Bojongsari meningkat dari 18,9% menjadi 23,2% pada periode yang sama. Kenaikan ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi menandakan tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok masyarakat bawah. Di sisi lain, kelompok 20% teratas di Kota Depok yang turun dari 45,3% (2023) menjadi 42,1% (2025), yang bisa mencerminkan penurunan kesenjangan jika disertai peningkatan daya beli kelompok menengah. Kelompok 40% menengah tampak relatif stabil di kisaran 36–42%, menandakan bahwa kelas menengah masih menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Meskipun begitu, perubahan kecil dalam distribusi antar kelompok tetap menggambarkan adanya dinamika ekonomi yang memerlukan kebijakan yang adaptif. Stabilitas kelompok menengah ini juga bisa menjadi indikasi ketahanan ekonomi di tengah fluktuasi ekonomi lokal.

Ketika membandingkan antar kecamatan, terlihat bahwa Tapos, Pancoran Mas, dan Depok memiliki distribusi pengeluaran yang paling seimbang antara ketiga kelompok. Misalnya, di Pancoran Mas tahun 2025, proporsi kelompok bawah, menengah, dan atas masing-masing adalah 17,4%, 39,8%, dan 42,8%, mencerminkan keseimbangan sosial ekonomi yang relatif stabil. Sebaliknya, kecamatan seperti Cimanggis dan Cipayung memperlihatkan ketimpangan yang cukup besar, di mana kelompok atas mencapai hampir 49%, sedangkan kelompok bawah hanya sekitar 14–16%. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa wilayah utara Depok cenderung lebih timpang dibanding wilayah tengah dan selatan. Faktor penyebabnya dapat mencakup perbedaan dalam akses pekerjaan, kepadatan penduduk, serta distribusi fasilitas ekonomi. Secara keseluruhan, Gambar 23 menunjukkan bahwa meskipun sebagian wilayah Depok memiliki keseimbangan pengeluaran yang baik, pemerataan ekonomi belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah dengan dominasi kelompok pengeluaran tertinggi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi ke depan perlu menitikberatkan

pada penguatan kelompok bawah dan menengah agar ketimpangan antar kecamatan dapat diminimalkan.



Gambar 24 Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terendah Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok 2023 – 2025

Berdasarkan Gambar 24, terdapat kecenderungan peningkatan proporsi kelompok bawah pada tahun 2025 di sebagian besar kecamatan, menandakan bahwa porsi masyarakat berpendapatan rendah semakin besar. Kecamatan dengan proporsi tertinggi pada tahun 2025 adalah Limo (24,9%) dan Tapos (22,9%),

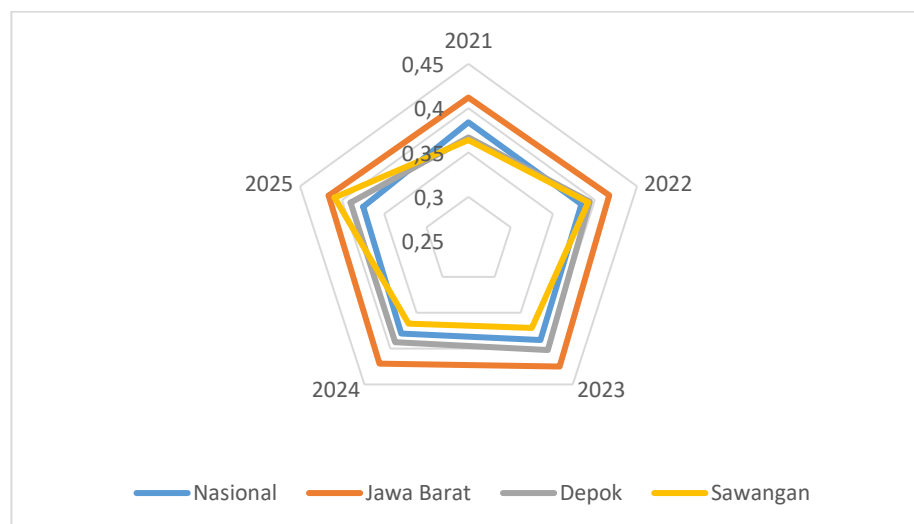
yang menunjukkan bahwa dua wilayah ini memiliki distribusi pengeluaran yang relatif lebih merata atau tingkat kemiskinan yang lebih rendah, karena kelompok bawah memiliki ruang ekonomi yang cukup besar. Sebaliknya, kecamatan seperti Cipayang (17,1%), dan Cimanggis (16,5%) memiliki proporsi kelompok bawah paling kecil, yang bisa diartikan sebagai ketimpangan yang lebih besar antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini menarik karena menunjukkan adanya perbedaan struktur ekonomi antar kecamatan yang cukup mencolok, meskipun semuanya berada dalam satu kota. Secara umum, rata-rata kelompok 40 persen terbawah di Kota Depok berada pada kisaran 17–22 persen, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat bawah relatif masih terbatas.

Sebagian besar kecamatan menunjukkan peningkatan proporsi kelompok bawah dari 2023 ke 2025, yang bisa mencerminkan dua hal: pertama, meningkatnya partisipasi ekonomi kelompok berpendapatan rendah; atau kedua, membesarnya kesenjangan karena penurunan daya beli kelompok bawah. Misalnya, di Cinere, proporsi naik dari 18,7% (2023) menjadi 21,9% (2025), dan di Bojongsari, meningkat dari 18,9% menjadi 23,2%. Namun, di beberapa kecamatan Pancoran Mas, proporsinya relatif stagnan di sekitar 16–17%, menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam kondisi kelompok bawah. Fenomena ini memperlihatkan adanya variasi dalam perkembangan sosial ekonomi antar wilayah, yang bisa disebabkan oleh perbedaan dalam akses pekerjaan, aktivitas ekonomi lokal, serta kebijakan pembangunan wilayah. Menariknya, wilayah dengan kenaikan kelompok bawah yang besar seperti Limo dan Bojongsari juga merupakan daerah dengan Gini Ratio yang relatif rendah, menunjukkan korelasi positif antara pemerataan pendapatan dan meningkatnya peran kelompok bawah. Dengan demikian, data ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis wilayah, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah dapat terjadi secara merata di seluruh Kecamatan Kota Depok.

3.8. Perbandingan Ketimpangan Tingkat Kecamatan dengan Ketimpangan Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2025

Nilai Gini Ratio digunakan untuk membandingkan tingkat ketimpangan antarwilayah di Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat dan tingkat nasional selama periode 2021–2025. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai posisi relatif Kota Depok dan kecamatan di dalamnya terhadap wilayah yang lebih luas.

Berdasarkan Gambar 25, nilai Gini Ratio di seluruh wilayah menunjukkan pola yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Gini Ratio Provinsi Jawa Barat tercatat paling tinggi, diikuti oleh tingkat nasional dan Kota Depok, sementara Kecamatan Sawangan memiliki nilai terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Sawangan pada awal periode pengamatan relatif lebih kecil dibandingkan wilayah pembanding lainnya. Dari tahun 2022 hingga 2024, nilai Gini Ratio di seluruh wilayah mengalami penurunan. Penurunan paling besar terjadi di Kecamatan Sawangan yang mencapai nilai terendah pada tahun 2024. Pada tahun 2025, seluruh wilayah mengalami sedikit kenaikan kembali nilai Gini Ratio.



Gambar 25 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

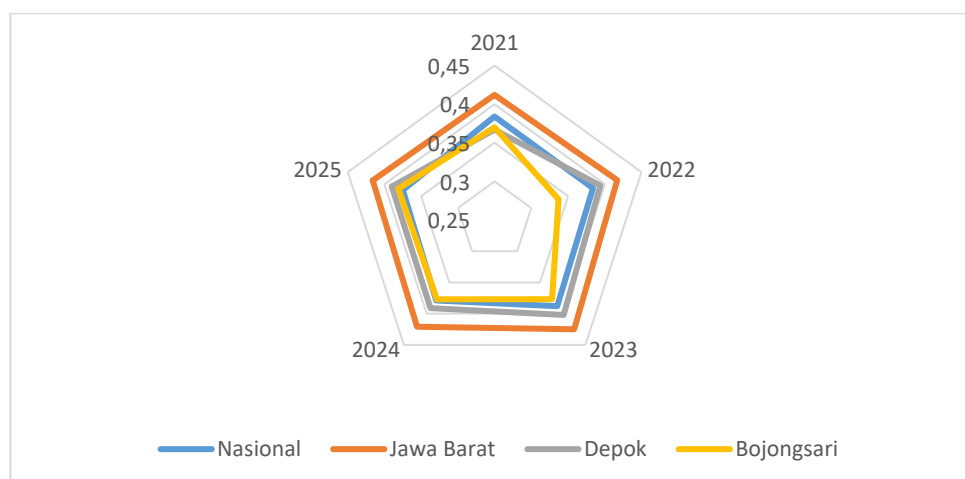
Selanjutnya, Tabel 33 menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025, nilai Gini Ratio Kecamatan Sawangan umumnya berada di bawah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan nasional. Namun pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Kecamatan Sawangan (0.409) tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Depok (0.390). Dengan demikian, ketimpangan di Sawangan meningkat pada tahun terakhir pengamatan dan nilainya berada di atas tingkat nasional, namun masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 33 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Sawangan
2021	0.384	0.412	0.367	0.364
2022	0.384	0.417	0.394	0.392
2023	0.388	0.425	0.402	0.371
2024	0.379	0.421	0.391*	0.365
2025	0.375	0.416	0.390*	0.409

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perubahan nilai Gini Ratio Kecamatan Bojongsari dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar 26. Secara umum, tingkat ketimpangan di wilayah ini menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode pengamatan. Pada tahun 2021, Gini Ratio Bojongsari tercatat sebesar 0.370 dan menjadi yang terendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat, nasional, maupun Kota Depok. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan di Bojongsari pada tahun 2021 relatif lebih kecil dibandingkan wilayah pembanding. Memasuki tahun berikutnya, nilai Gini Ratio Bojongsari menurun cukup tajam menjadi 0.337 pada tahun 2022. Setelah itu, terjadi kenaikan pada tahun 2023 dengan nilai 0.377 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Gini Ratio Bojongsari kembali meningkat menjadi 0.381. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa setelah mengalami perbaikan pada 2022, tingkat ketimpangan di Bojongsari kembali sedikit melebar pada dua tahun terakhir periode pengamatan.



Gambar 26 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 34, nilai Gini Ratio Bojongsari sepanjang 2021–2025 sebagian besar berada di bawah nilai Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan nasional. Namun, pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Bojongsari (0.381) tercatat lebih tinggi daripada tingkat nasional (0.375), tetapi masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (0.416) dan Kota Depok (0.390). Secara keseluruhan, Gini Ratio Bojongsari menunjukkan fluktuasi yang moderat dengan kecenderungan ketimpangan yang tetap lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding lainnya.

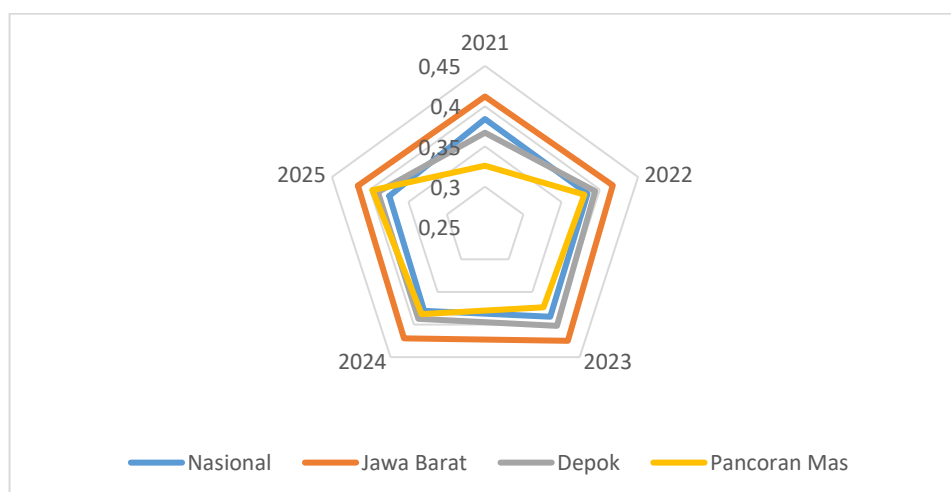
Tabel 34 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Bojongsari
2021	0.384	0.412	0.367	0.370
2022	0.384	0.417	0.394	0.337
2023	0.388	0.425	0.402	0.377
2024	0.379	0.421	0.391*	0.377
2025	0.375	0.416	0.390*	0.381

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perkembangan nilai Gini Ratio Kecamatan Pancoran Mas dibandingkan dengan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional selama periode 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar 27. Pada tahun 2021, Gini Ratio

Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang tertinggi di antara wilayah pembanding. Tingkat nasional dan Kota Depok berada sedikit di bawahnya, sedangkan Kecamatan Pancoran Mas mencatat nilai paling rendah, yaitu 0.326. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode pengamatan, ketimpangan di Pancoran Mas relatif kecil dibandingkan wilayah lain. Memasuki tahun 2022, nilai Gini Ratio Pancoran Mas meningkat tajam menjadi 0.380. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 0.373 dan kembali naik menjadi 0.384 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Pancoran Mas mencapai 0.397, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, pola perubahan ini menggambarkan fluktuasi yang cenderung meningkat pada dua tahun terakhir.



Gambar 27 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 35, selama periode 2021 hingga 2025, nilai Gini Ratio Pancoran Mas sebagian besar masih berada di bawah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan nasional. Namun pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Pancoran Mas (0.397) tercatat lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional (0.375). Sementara itu, nilainya masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (0.416) dan Kota Depok (0.390). Secara keseluruhan, fluktuasi nilai Gini Ratio menunjukkan bahwa ketimpangan di Pancoran Mas mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025,

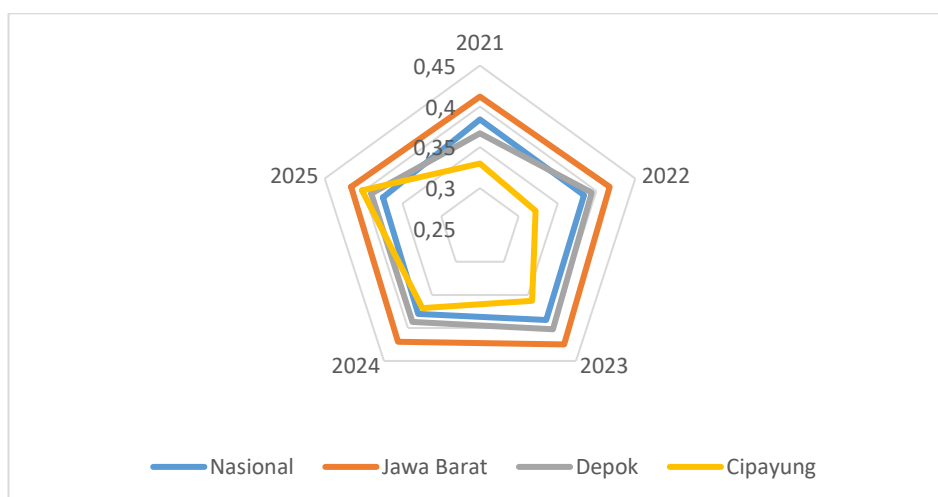
tetapi tetap berada pada kisaran yang relatif rendah dibandingkan wilayah pembanding lainnya.

Tabel 35 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Pancoran Mas
2021	0.384	0.412	0.367	0.326
2022	0.384	0.417	0.394	0.380
2023	0.388	0.425	0.402	0.373
2024	0.379	0.421	0.391*	0.384
2025	0.375	0.416	0.390*	0.397

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perkembangan Gini Ratio Kecamatan Cipayung selama periode 2021 hingga 2025 disajikan pada Gambar 28. Secara keseluruhan, tingkat ketimpangan di wilayah ini menunjukkan perubahan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Gini Ratio Cipayung tercatat sebesar 0.330, lebih rendah dibandingkan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, maupun tingkat nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan di Cipayung pada tahun 2021 tergolong rendah dibandingkan wilayah pembanding lainnya. Pada tahun 2022, nilai Gini Ratio Cipayung menurun menjadi 0.322, yang merupakan titik terendah selama periode pengamatan. Setelah itu, nilai ketimpangan kembali meningkat menjadi 0.359 pada tahun 2023 dan 0.370 pada tahun 2024. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2025, ketika Gini Ratio mencapai 0.402. Kenaikan ini menunjukkan bahwa setelah sempat membaik pada 2022, ketimpangan di Cipayung mengalami pelebaran kembali dalam dua tahun terakhir.



Gambar 28 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 36, sepanjang periode 2021 hingga 2025 nilai Gini Ratio Kecamatan Cipayung sebagian besar tetap di bawah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan nasional. Namun, pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Cipayung (0.402) sudah melampaui tingkat nasional (0.375) dan mendekati nilai Kota Depok (0.390). Meskipun demikian, nilainya masih berada di bawah tingkat Provinsi Jawa Barat (0.416). Secara umum, tren Gini Ratio Kecamatan Cipayung menunjukkan fluktuasi yang moderat dengan kecenderungan peningkatan pada dua tahun terakhir pengamatan.

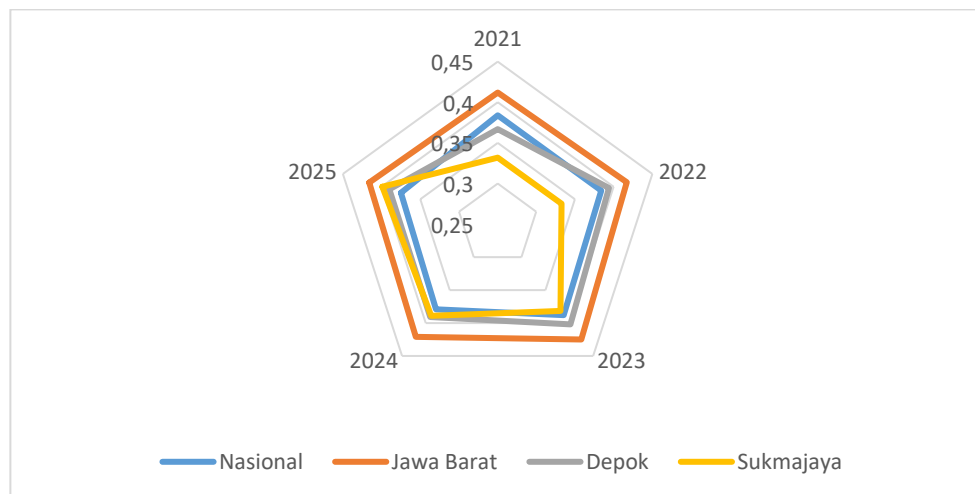
Tabel 36 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Cipayung
2021	0.384	0.412	0.367	0.330
2022	0.384	0.417	0.394	0.322
2023	0.388	0.425	0.402	0.359
2024	0.379	0.421	0.391*	0.370
2025	0.375	0.416	0.390*	0.402

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perbandingan nilai Gini Ratio Kecamatan Sukmajaya selama periode 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar 29. Secara umum, tingkat ketimpangan di wilayah ini menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat

pada tahun 2025. Pada tahun 2021, nilai Gini Ratio Sukmajaya sebesar 0.332, lebih rendah dibandingkan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada awal periode pengamatan, ketimpangan di Sukmajaya masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, nilai Gini Ratio Sukmajaya sedikit meningkat menjadi 0.333, kemudian naik cukup tajam pada tahun 2023 menjadi 0.382. Kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan nilai 0.389, dan mencapai 0.399 pada tahun 2025. Pola tersebut memperlihatkan bahwa Sukmajaya mengalami peningkatan ketimpangan secara bertahap selama tiga tahun terakhir pengamatan.



Gambar 29 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

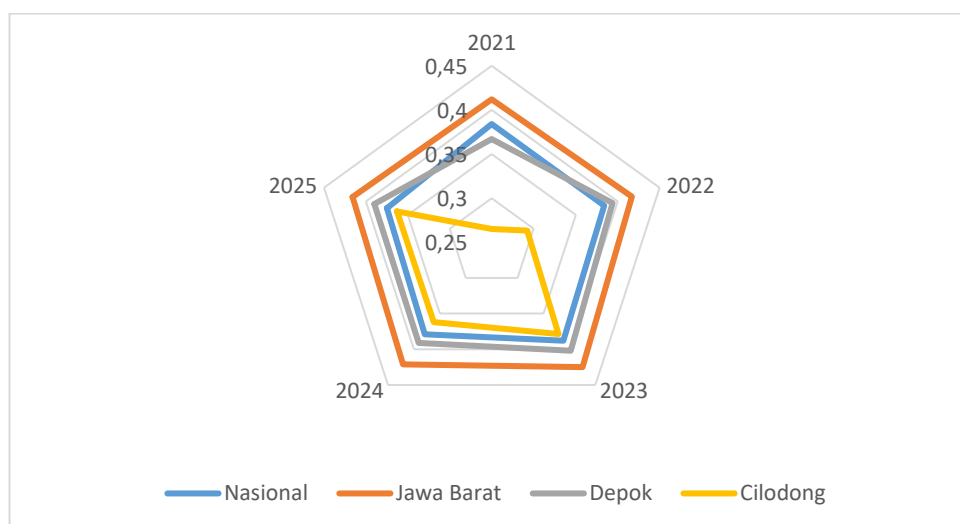
Berdasarkan Tabel 37, selama periode 2021 hingga 2025 nilai Gini Ratio Kecamatan Sukmajaya sebagian besar masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Namun, pada tahun 2025, nilai Gini Ratio Sukmajaya (0.399) telah melampaui tingkat nasional (0.375). Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio Sukmajaya menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun nilai ketimpangannya masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding di tingkat provinsi dan kota.

Tabel 37 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Sukmajaya
2021	0.384	0.412	0.367	0.332
2022	0.384	0.417	0.394	0.333
2023	0.388	0.425	0.402	0.382
2024	0.379	0.421	0.391*	0.389
2025	0.375	0.416	0.390*	0.399

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perubahan nilai Gini Ratio Kecamatan Cilodong selama periode 2021 hingga 2025 disajikan pada Gambar 30. Secara umum, tingkat ketimpangan di Cilodong menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2023.



Gambar 30 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Pada tahun 2021, nilai Gini Ratio Cilodong sebesar 0.265, menjadi yang paling rendah di antara seluruh wilayah pembanding, yaitu Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan nasional. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan di Cilodong pada awal periode pengamatan relatif kecil. Pada tahun 2022, nilai Gini Ratio Cilodong meningkat menjadi 0.292 dan terus naik hingga mencapai 0.379 pada tahun 2023. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 dengan nilai 0.362, dan kenaikan kembali pada tahun 2025 menjadi 0.363. Pola ini

menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan di Cilodong sempat meningkat cukup signifikan pada tahun 2023, nilainya kemudian stabil pada dua tahun terakhir.

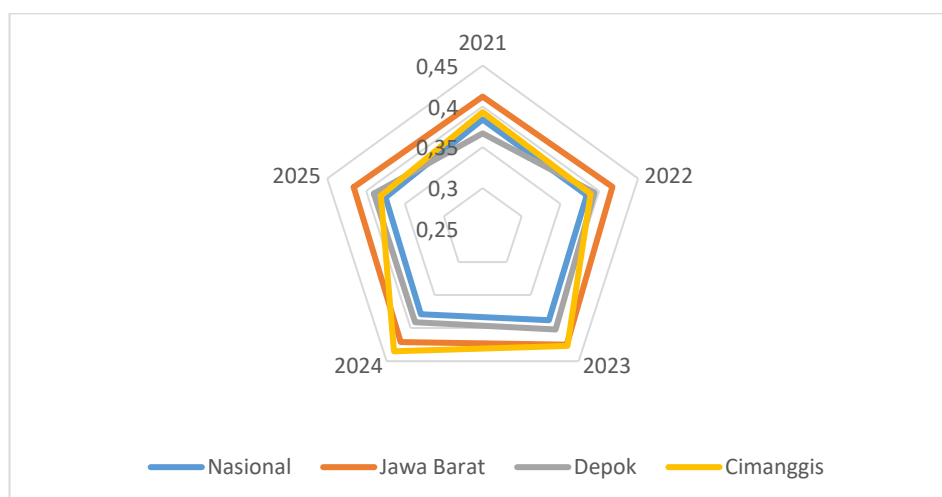
Berdasarkan Tabel 38, sepanjang periode 2021 hingga 2025, nilai Gini Ratio Cilodong secara konsisten lebih rendah dibandingkan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, maupun tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Cilodong masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kota Depok dan sekitarnya.

Tabel 38 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Cilodong
2021	0.384	0.412	0.367	0.265
2022	0.384	0.417	0.394	0.292
2023	0.388	0.425	0.402	0.379
2024	0.379	0.421	0.391*	0.362
2025	0.375	0.416	0.390*	0.363

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perbandingan nilai Gini Ratio Kecamatan Cimanggis selama periode 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar 31. Secara keseluruhan, tingkat ketimpangan di wilayah ini berfluktuasi dengan perubahan yang cukup bervariasi antar tahun. Pada tahun 2021, nilai Gini Ratio Cimanggis tercatat sebesar 0.393, sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Depok namun masih di bawah Provinsi Jawa Barat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di Cimanggis pada awal periode pengamatan tergolong sedang bila dibandingkan dengan wilayah pembanding. Pada tahun 2022, nilai Gini Ratio Cimanggis menurun menjadi 0.389, kemudian mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2023 hingga mencapai 0.427, yang merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir. Setelah itu, nilai ketimpangan di Cimanggis kembali naik menjadi 0.435 pada tahun 2024 sebelum menurun cukup signifikan menjadi 0.381 pada tahun 2025. Pola ini memperlihatkan bahwa setelah mencapai puncak ketimpangan pada tahun 2024, kondisi di Cimanggis mengalami perbaikan pada tahun terakhir pengamatan.



Gambar 31 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 39, nilai Gini Ratio Cimanggis sepanjang 2021–2025 cenderung berada di atas tingkat nasional dan Kota Depok, namun tetap lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat pada sebagian besar data di 5 tahun terakhir. Secara umum, Gini Ratio Cimanggis menunjukkan dinamika yang lebih tajam dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Depok, dengan fluktuasi yang menandakan perubahan cukup nyata dalam distribusi ketimpangan selama lima tahun terakhir.

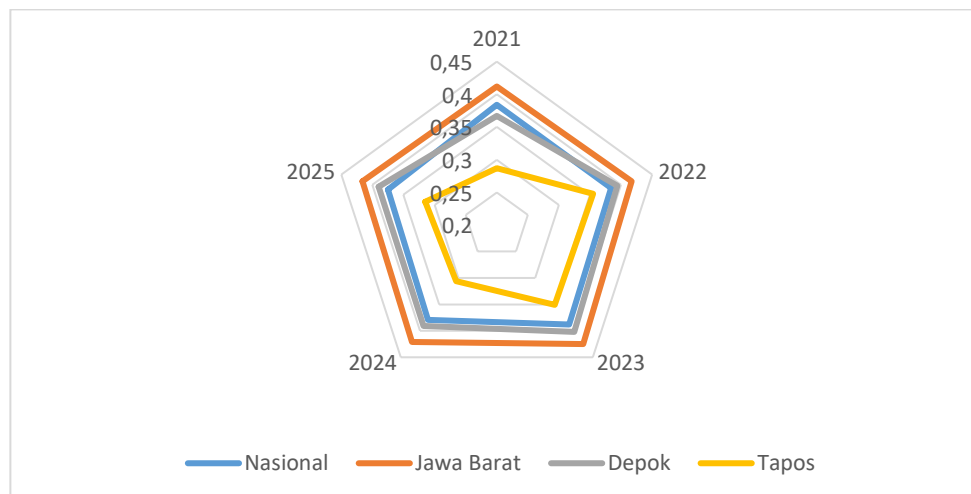
Tabel 39 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Cimanggis
2021	0.384	0.412	0.367	0.393
2022	0.384	0.417	0.394	0.389
2023	0.388	0.425	0.402	0.427
2024	0.379	0.421	0.391*	0.435
2025	0.375	0.416	0.390*	0.381

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Perkembangan Gini Ratio Kecamatan Tapos selama periode 2021 hingga 2025 disajikan pada Gambar 32. Secara umum, nilai Gini Ratio di wilayah ini menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode pengamatan. Pada tahun 2021, Gini Ratio Tapos tercatat sebesar 0.287,

merupakan yang paling rendah dibandingkan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional. Nilai tersebut menggambarkan bahwa ketimpangan di Tapos pada awal periode pengamatan relatif kecil dibandingkan wilayah pembanding lainnya. Pada tahun 2022, nilai Gini Ratio meningkat cukup tajam menjadi 0.355, kemudian sedikit menurun menjadi 0.351 pada tahun 2023. Selanjutnya, penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai 0.306, dan pada tahun 2025 meningkat sedikit menjadi 0.315. Secara keseluruhan, pola ini memperlihatkan bahwa meskipun sempat naik pada awal periode, ketimpangan di Tapos cenderung menurun hingga akhir masa pengamatan.



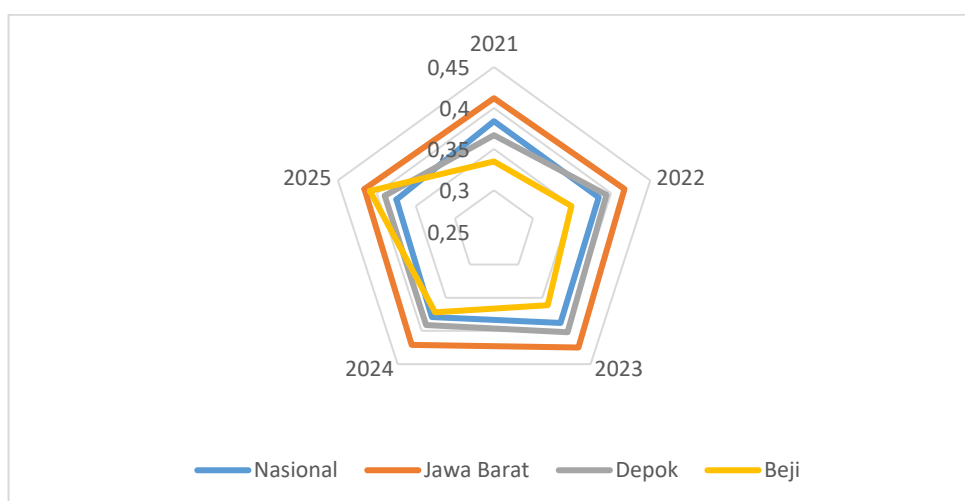
Gambar 32 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 40, selama tahun 2021 hingga 2025 nilai Gini Ratio Kecamatan Tapos secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tapos termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan paling rendah di Kota Depok selama periode pengamatan lima tahun terakhir.

Tabel 40 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Tapos
2021	0.384	0.412	0.367	0.287
2022	0.384	0.417	0.394	0.355
2023	0.388	0.425	0.402	0.351
2024	0.379	0.421	0.391*	0.306
2025	0.375	0.416	0.390*	0.315

Berdasarkan Gambar 33, nilai Gini Ratio Kecamatan Beji pada tahun 2025 tercatat sebesar 0.409, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0.372. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah Beji sedikit melebar pada tahun terakhir pengamatan. Secara umum, pola pergerakan Gini Ratio selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat di dua tahun terakhir. Jika ditelusuri dari tahun 2021, nilai Gini Ratio Beji tercatat sebesar 0.335, kemudian meningkat menjadi 0.349 pada tahun 2022 dan 0.361 pada tahun 2023. Setelah sempat menurun pada tahun 2024, ketimpangan kembali meningkat pada tahun 2025. Pola ini memperlihatkan bahwa ketimpangan di Beji mengalami perubahan yang tidak stabil, dengan kecenderungan peningkatan menjelang akhir periode pengamatan.



Gambar 33 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

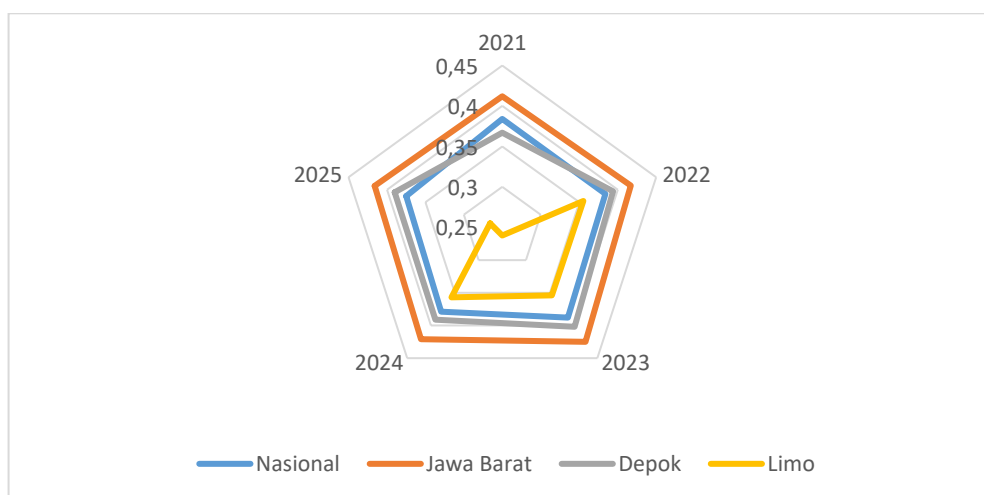
Berdasarkan Tabel 41, sepanjang periode 2021 hingga 2025, nilai Gini Ratio Kecamatan Beji sebagian besar masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Namun, pada tahun 2025 nilainya (0.409) sudah mendekati Kota Depok (0.390) dan berada di atas tingkat nasional (0.375). Secara keseluruhan, Gini Ratio Kecamatan Beji menunjukkan tren kenaikan bertahap selama lima tahun terakhir, yang menandakan peningkatan ketimpangan ringan pada akhir periode.

Tabel 41 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Beji
2021	0.384	0.412	0.367	0.335
2022	0.384	0.417	0.394	0.349
2023	0.388	0.425	0.402	0.361
2024	0.379	0.421	0.391*	0.372
2025	0.375	0.416	0.390*	0.409

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Nilai Gini Ratio Kecamatan Limo selama periode 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada Gambar 34. Secara umum, tingkat ketimpangan di wilayah ini menunjukkan pola yang berfluktuasi cukup tajam antar tahun. Pada tahun 2021, Gini Ratio Limo tercatat sebesar 0.240 dan menjadi yang paling rendah di antara seluruh wilayah pembanding, yaitu Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan di Limo pada awal periode pengamatan relatif kecil. Pada tahun 2022, nilai Gini Ratio meningkat tajam menjadi 0.355, sebelum sedikit menurun ke 0.354 pada tahun 2023. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 0.357, namun pada tahun 2025 Gini Ratio Limo justru menurun signifikan menjadi 0.266. Fluktuasi ini memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Limo mengalami perubahan yang tidak stabil dari tahun ke tahun, dengan penurunan yang cukup besar pada tahun terakhir pengamatan.



Gambar 34 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 42, nilai Gini Ratio Kecamatan Limo selama periode 2021 hingga 2025 secara umum lebih rendah dibandingkan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional. Meskipun sempat meningkat pada pertengahan periode, penurunan di tahun 2025 membuat Limo kembali menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan paling rendah di antara kecamatan-kecamatan di Kota Depok.

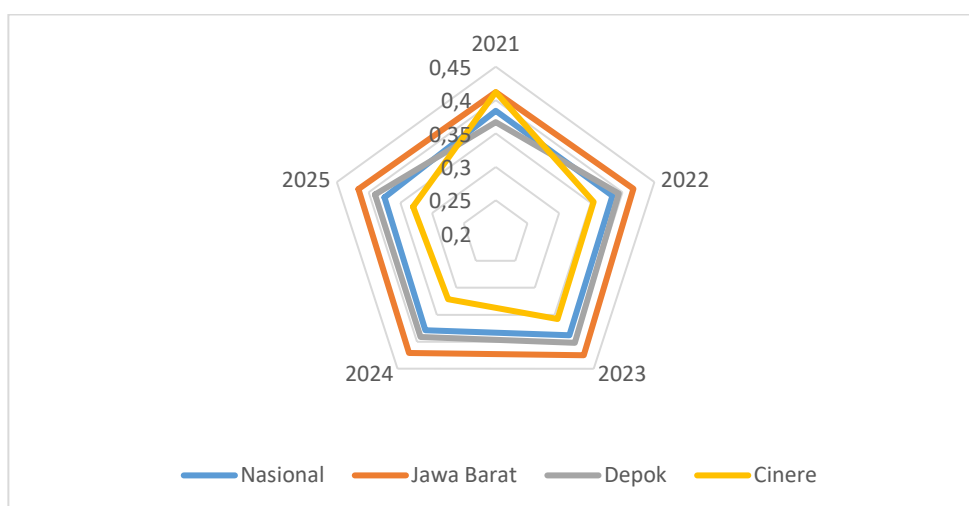
Tabel 42 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Limo
2021	0.384	0.412	0.367	0.240
2022	0.384	0.417	0.394	0.355
2023	0.388	0.425	0.402	0.354
2024	0.379	0.421	0.391*	0.357
2025	0.375	0.416	0.390*	0.266

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

Berdasarkan Gambar 3, nilai Gini Ratio Kecamatan Cinere pada tahun 2025 tercatat sebesar 0.330, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0.321. Peningkatan ini menunjukkan adanya sedikit pelebaran ketimpangan pada akhir periode pengamatan. Secara umum, pola perubahan Gini Ratio selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dibandingkan awal periode. Pada tahun 2021, nilai Gini Ratio Cinere berada di

angka 0.412, menjadi salah satu yang tertinggi di antara kecamatan lain di Kota Depok. Angka ini kemudian turun cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 0.354 dan relatif stabil di kisaran 0.35 hingga 0.36 selama tahun 2023. Penurunan berlanjut hingga 2024 dengan nilai terendah 0.321 sebelum sedikit naik pada 2025. Perubahan ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Cinere sempat membaik pada pertengahan periode sebelum mengalami kenaikan ringan di tahun terakhir.



Gambar 35 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 43, nilai Gini Ratio Kecamatan Cinere secara umum berada di bawah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan tingkat nasional pada sebagian besar tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami peningkatan pada 2025, tingkat ketimpangan di Cinere masih relatif rendah dibandingkan wilayah pembanding lainnya di Kota Depok dan sekitarnya.

Tabel 43 Nilai *Gini Ratio* Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional tahun 2021-2025

Tahun	Nasional (Semester 1)	Jawa Barat (Semester 1)	Depok	Cinere
2021	0.384	0.412	0.367	0.412
2022	0.384	0.417	0.394	0.354
2023	0.388	0.425	0.402	0.358
2024	0.379	0.421	0.391*	0.321
2025	0.375	0.416	0.390*	0.330

Sumber: BPS, diolah, *hasil proyeksi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) *Gini ratio* Kota Depok Tahun 2025 sebesar 0,390 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang.
- b) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% terendah di Kota Depok pada tahun 2025 sebesar 19,6%, sehingga tergolong pada ketimpangan rendah.
- c) Berdasarkan *gini ratio* di Kota Depok pada periode sebelas tahun terakhir (2014-2025), ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Pada tahun 2025, *gini ratio* Kota Depok diproyeksi lebih rendah 0.008 poin dibandingkan tahun 2024.
- d) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada periode 2023 Kota Depok berada pada tingkat ketimpangan sedang, sementara pada periode 2024 sampai dengan 2025, Kota Depok berada pada tingkat ketimpangan rendah.
- e) Berdasarkan kriteria Gini Ratio, seluruh kecamatan di Kota Depok tahun 2025 umumnya terkategori ketimpangan sedang, dengan nilai Gini Ratio masing-masing kecamatan sebagai berikut: 0,315 (Tapos); 0,266 (Limo); 0,330 (Cinere); 0,402 (Cipayung); 0,409 (Beji); 0,409 (Sawangan); 0,397 (Pancoran Mas); 0,381 (Bojongsari); 0,363 (Cilodong); 0,399 (Sukmajaya); dan 0,381 (Cimanggis).
- f) Berdasarkan kriteria Bank Dunia, sebagian besar kecamatan di kota Depok terkategori ketimpangan rendah karena persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk di atas 17%.

4.2. Saran

- a) Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kota ini rata-rata berada di angka 6,12%, dengan sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi pendorong utama (<https://depok.inews.id>). Namun manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum merata terdistribusi di antara berbagai lapisan masyarakat. Mayoritas manfaat masih dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Depok untuk fokus pada pembangunan yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Depok harus secara aktif mencari berbagai solusi kreatif. Prioritas utama harus diberikan pada golongan masyarakat yang hingga saat ini belum merasakan dampak positif dari hasil pembangunan. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Depok dapat mengadakan program pelatihan keterampilan kerja yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat, serta upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lainnya, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung. Dengan memberikan akses pada keterampilan baru, masyarakat dapat meningkatkan daya saing dan peluang kerja mereka. Upaya-upaya inovatif dan inklusif lainnya harus menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan, sehingga setiap warga dapat ikut serta dalam kemajuan Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*. 1–20
- de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kemenparekraf. 2014. *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- The Equality Trust. 2011. "Income inequality: Trends and Measures." *Equality Trust Research Digest*; no.2: pp.1–8
- Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). *WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)*.
- Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. *ADB Working Paper Series*.
- World Bank. 2016. *Indonesia's rising divide*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

**Gedung Dibaleka II
Komplek Balaikota Depok Lantai 7
Jalan Margonda Raya No.54 Depok
Telp: (021) 29402276 dan (021) 7764410
Email: diskominfo@depok.go.id**